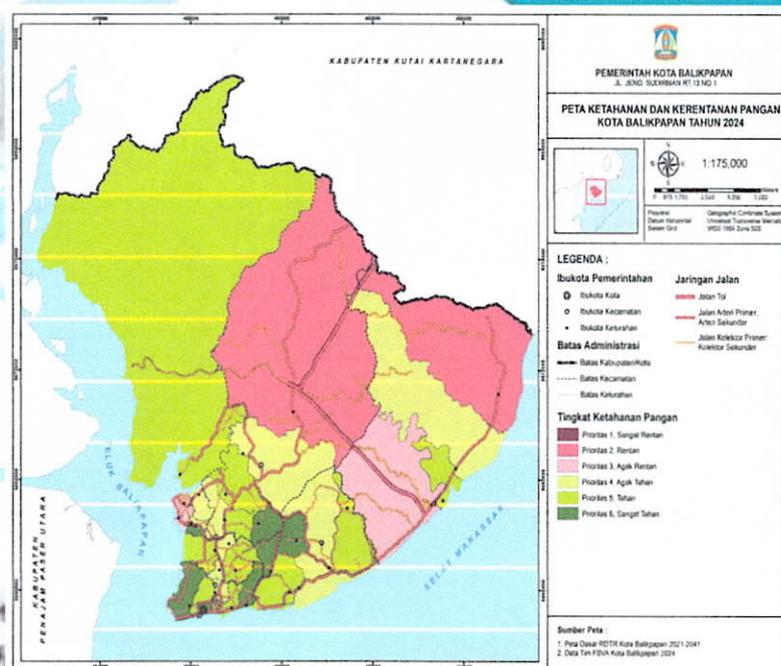


# PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN KOTA BALIKPAPAN

## FOOD SECURITY AND VULNERABILITY ATLAS

# 2024

## Data Indikator Tahun 2023



DINAS PANGAN, PERTANIAN  
DAN PERIKANAN  
KOTA BALIKPAPAN



## SAMBUTAN WALI KOTA BALIKPAPAN

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala nikmat-Nya sehingga kita dapat menyelesaikan tugas kedinasan kita, salah satu di antaranya adalah Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas-FSVA*) Kota Balikpapan tahun 2024.

Saya menyambut baik dan menghargai kerja dari Tim Penyusun Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang terdiri atas Tim FSVA Badan Pangan Nasional Republik Indonesia, Tim FSVA Provinsi Kaltim dan Tim FSVA Kota Balikpapan. Peta ini memberikan informasi tentang situasi kondisi ketahanan dan kerentanan pangan sampai ke tingkat kelurahan dengan menggunakan 5 (Lima) indikator dari aspek ketersediaan, akses, pemanfaatan pangan.

Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan ini merupakan wujud pelaksanaan amanat Undang-Undang nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi. Kedua regulasi tersebut mengamanatkan bahwa pemerintah berkewajiban membangun, menyusun dan mengembangkan sistem informasi pangan dan gizi yang terintegrasi, perencanaan, pemantauan dan evaluasi, stabilisasi pasokan dan harga pangan, dan sistem peringatan terhadap masalah kerawanan pangan dan gizi.

Peta ini merupakan gambaran makro tentang situasi ketahanan pangan di Kota Balikpapan sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pengambilan keputusan, terutama dalam penyusunan program strategis oleh para pemangku kepentingan. Mengingat isu ketahanan pangan bersifat multi dimensi maka pembangunan ketahanan pangan harus dilakukan dalam satu koordinasi yang terarah, menyeluruh dan berkesinambungan.

Akhir kata, semoga Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan ini dapat memberikan manfaat bagi upaya pembangunan di Kota Balikpapan, khususnya pembangunan ketahanan pangan. Balikpapan Kubangun, Kujaga dan Kubela.

Kubangun dengan amal,

Kujaga dengan iman,

Kubela dengan doa.

Balikpapan, 11 Desember 2024

Wali Kota Balikpapan

**Rahmad Maslud, SE. ME**

**TIM PENYUSUN**

**Pengarah:**

Ir. Sri Wahjuningsih

**Pelaksana:**

Wahidin Alaudin, SP, MURP (Ketua)

Dicky Hariyono (Sekretaris)

**Anggota:**

Joko Mujiono

Emmanuel Azhar

Theodorus Dayutama

Devi Permanasari

Alfiyah R. T.

Ari Priswanto

Natalia Sarah Pahlevi

Nurlaila

Yuliana

Diah Ernawati

Jumariyani

Pristianti N. A

Emma Diantary

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam pengambilan keputusan dan kebijakan terkait pangan ketersediaan informasi ketahanan pangan yang akurat, komprehensif, dan tertata dengan baik sangatlah mutlak diperlukan untuk mendukung upaya pencegahan dan penanganan kerawanan pangan dan gizi, karena dapat memberikan arah dan rekomendasi kepada pembuat keputusan dalam penyusunan program, kebijakan, serta pelaksanaan intervensi di tingkat pusat dan daerah.

Undang-Undang No 18 tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah No 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi mengamanatkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk membangun, menyusun, dan mengembangkan Sistem Informasi Pangan dan Gizi yang terintegrasi. Informasi tersebut dituangkan dalam Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan.

Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas – FSVVA*) disusun secara berjenjang. FSVVA Nasional dengan lingkup analisis kabupaten/kota, disusun oleh Badan Pangan Nasional. FSVVA Provinsi dengan lingkup analisis kecamatan, disusun oleh Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura. FSVVA Kota Balikpapan dengan lingkup analisis kelurahan, disusun oleh Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan.

Penyusunan FSVVA ini mengacu pada Panduan Penyusunan yang diterbitkan oleh Badan Pangan Nasional dengan mempertimbangan 3 (tiga) aspek ketahanan pangan, yakni ketersediaan, keterjangkauan (akses), dan pemanfaatan pangan khusus untuk daerah perkotaan.

Indikator ketersediaan pangan terdiri atas rasio jumlah sarana dan prasarana penyediaan pangan. Indikator akses pangan terdiri atas rasio jumlah penduduk tingkat kesejahteraan rendah dan akses jalan. Indikator aspek pemanfaatan pangan terdiri atas rasio jumlah penduduk terhadap penggunaan air bersih dan jumlah tenaga kesehatan.

Jenis data yang digunakan diolah bersumber dari tim penyusun yang dibentuk berdasarkan SK Walikota nomor 188.45-401/2024 tanggal 5 September tahun 2024 yang terdiri atas instansi organisasi perangkat daerah lingkup Pemerintah Kota Balikpapan.

Dari 34 kelurahan tidak terdapat kelurahan dengan Prioritas 1, terdapat 2 kelurahan Prioritas 2, 3 kelurahan Prioritas 3, 10 kelurahan Prioritas 4, 12 kelurahan Prioritas 5 dan 7 kelurahan Prioritas 6. Adapun kelurahan yang termasuk Rentan Pangan adalah Kelurahan Teritip dan Kelurahan Karang Joang, sedangkan Kelurahan Damai Baru tergolong kelurahan sangat tahan pangan.

Dari hasil tersebut diharapkan memberikan informasi kepada perangkat daerah maupun instansi lainnya dalam hal penyediaan sarana pangan, peningkatan kesejahteraan penduduk dan tenaga Kesehatan untuk memberikan perhatian dan fokus kegiatan yang berhubungan dengan indikator tersebut di kelurahan Rentan Pangan.

Demikian ringkasan dari laporan penyusunan peta ketahanan dan kerentanan pangan Kota Balikpapan ini sebagai informasi dalam pelaksanaan rekomendasi pengambilan kebijakan pembangunan pangan dan gizi.

## DAFTAR ISI

SAMBUTAN WALI KOTA BALIKPAPAN .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
TIM PENYUSUN .....	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR .....	viii
DAFTAR PETA.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1    LATAR BELAKANG .....	1
1.2    KERANGKA KONSEP KETAHANAN PANGAN DAN GIZI .....	3
1.3    METODOLOGI.....	5
BAB 2 KETERSEDIAAN PANGAN .....	10
2.1    SARANA DAN PRASARANA PENYEDIA PANGAN .....	10
2.3    STRATEGI PEMENUHAN KETERSEDIAAN PANGAN .....	12
BAB 3 AKSES TERHADAP PANGAN.....	13
3.1    PENDUDUK DENGAN TINGKAT KESEJAHTERAAN TERENDAH.....	13
3.2    AKSES TRANSPORTASI .....	16
3.3    STRATEGI PENINGKATAN AKSES PANGAN .....	16
BAB 4 PEMANFAATAN PANGAN .....	17
4.1    AKSES TERHADAP AKSES AIR BERSIH.....	17
4.3    RASIO TENAGA KESEHATAN.....	19
4.4    STRATEGI PENINGKATAN PEMANFAATAN PANGAN .....	21
BAB 5 KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN KOMPOSIT .....	22
5.1    KONDISI KETAHANAN PANGAN .....	22
5.2    FAKTOR PENYEBAB KERENTANAN PANGAN.....	24
BAB 6 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN .....	26
6.1    KESIMPULAN.....	26
6.2    REKOMENDASI KEBIJAKAN.....	27
DAFTAR PUSTAKA .....	29

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Indikator FSVA Kota 2022.....	6
Tabel 2. Bobot Indikator Individu .....	8
Tabel 3. Keterangan dan Pola Warna FSVA .....	9
Tabel 4. Sebaran Rasio Sarana Prasarana Penyedia Pangan berdasarkan Prioritas .....	10
Tabel 5. Persentase Populasi di Bawah Garis Kemiskinan Kota Balikpapan.....	13
Tabel 6. Sebaran Kelurahan dengan Tingkat Kesejahteraan Terendah berdasarkan Skala Prioritas.....	14
Tabel 7. Sebaran Kelurahan berdasarkan Rumah Tangga tanpa Akses Air Bersih berdasarkan Skala Prioritas.....	17
Tabel 8. Sebaran Rasio Tenaga Kesehatan di Kelurahan berdasarkan Skala Prioritas.....	19
Tabel 9. Sebaran Jumlah Kelurahan berdasarkan Prioritas.....	22
Tabel 10. Daftar Kelurahan Rentan Pangan Prioritas 2 .....	24
Tabel 11. Daftar Kelurahan Rentan Pangan Prioritas 3 .....	24

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Konseptual Ketahanan Pangan dan Gizi.....	4
Gambar 2. Prosentase Kelurahan dengan Indikator Ketersediaan Sarana Penyedia Pangan.....	11
Gambar 3. Prosentase Kelurahan dengan Indikator Penduduk dengan Tingkat Kesejahteraan Terendah.....	14
Gambar 4. Prosentase Kelurahan dengan Indikator Akses terhadap Air Bersih.....	18
Gambar 5. Prosentase Kelurahan dengan Indikator Rasio Tenaga Kesehatan .....	20
Gambar 6. Prosentase Kelurahan berdasarkan Analisis Komposit (Gabungan Indikator) .....	23

## DAFTAR PETA

Peta 1. Peta Kelurahan dengan Indikator Sarana Penyedia Pangan.....	11
Peta 2. Peta Kelurahan dengan Indikator Kesejahteraan Penduduk .....	15
Peta 3. Peta Kelurahan dengan Indikator Akses Jalan .....	16
Peta 4. Peta Kelurahan dengan Indikator Akses Air Bersih.....	18
Peta 5. Peta Kelurahan dengan Indikator Tenaga Kesehatan.....	20
Peta 6. Peta Komposit Ketahanan dan Kerentanan Pangan .....	23

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 LATAR BELAKANG

Kota Balikpapan terdiri dari 6 (enam) kecamatan dan 34 (tiga puluh empat) kelurahan dengan total penduduk semester II tahun 2023 sebesar 738.532 jiwa (sumber : Disdukcapil Balikpapan). Secara geografis terletak di bagian selatan garis khatulistiwa, memanjang dari utara ke selatan di antara  $116^{\circ}5'$  -  $117^{\circ}0'$  Bujur Timur dan memanjang dari barat ke timur di antara  $1^{\circ}0'$  -  $1^{\circ}5'$  Lintang Utara/Selatan. Kota Balikpapan di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Kutai Kartanegara, sebelah selatan berbatasan dengan Selat Makassar, sebelah timur berbatasan dengan Selat Makassar dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Penajam Paser Utara yang memiliki wilayah seluas 51.451 ha (BPK, 2022).

Secara administratif, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1996, Kota Balikpapan terdiri dari 5 (lima) Kecamatan dan 27 (dua puluh tujuh) Kelurahan, Namun sejak dikeluarkannya Perubahan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan 7 (Tujuh) Kelurahan Dalam Wilayah Kota Balikpapan, dan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kecamatan Balikpapan Kota Dalam Wilayah Kota Balikpapan, kini Kota Balikpapan terdiri dari 6 (enam) Kecamatan dan 34 (tiga puluh empat) Kelurahan, Enam kecamatan tersebut antara lain: Balikpapan Selatan, Balikpapan Timur, Balikpapan Utara, Balikpapan Tengah, Balikpapan Barat, dan Balikpapan Kota. (Kota Balikpapan dalam angka, 2024).

Kota Balikpapan, memiliki iklim tropis dengan hujan sepanjang tahun, Suhu udara tertinggi sepanjang tahun 2022 tercatat pada bulan April sebesar 33,4 derajat celsius dan terendah pada bulan Februari sebesar 22 derajat celsius, Adapun secara rata-rata, suhu udara tertinggi pada tahun 2022 tercatat pada bulan Mei dengan 27,8 derajat celsius dan terendah pada bulan Januari, Februari dan September dengan 26,8 derajat celsius, Curah hujan tertinggi pada tahun 2022 tercatat pada bulan Agustus dengan 552,0 mm dan terendah pada bulan Mei dengan 109 mm, Adapun hari hujan tertinggi yang tercatat pada tahun 2022 terjadi pada bulan Oktober dengan 22 hh (Kota Balikpapan dalam angka, 2023).

PDRB Kota Balikpapan Atas Dasar Harga Berlaku pada tahun 2023 adalah sebesar Rp 143.169,19 Millyar, secara nominal meningkat dari tahun sebelumnya. Bila dilihat berdasarkan distribusinya seperti halnya tahun sebelumnya, kategori Industri Pengolahan memberikan kontribusi tertinggi kepada PDRB Kota Balikpapan, yakni sebesar 47,26 persen; atau hampir separuh dari total keseluruhan PDRB Kota Balikpapan tahun 2023. Di urutan kedua adalah kategori Konstruksi, yang memberikan kontribusi 15,67 persen. Kemudian di urutan ketiga adalah kategori Transportasi dan Pergudangan dengan 11,65 persen (Kota Balikpapan dalam angka, 2023).

Sementara itu, PDRB Kota Balikpapan Atas Dasar Harga Konstan pada tahun 2023 adalah sebesar Rp 97.060,15 miliar, meningkat pula bila dibandingkan tahun sebelumnya. Dari angka PDRB harga konstan ini dapat diturunkan menjadi laju pertumbuhan Kota Balikpapan, yang pada periode 2022-2023 mengalami kontraksi sebesar 6,49 persen. Bila dirinci per kategori, kategori Pengadaan Listrik dan Gas menunjukkan laju

pertumbuhan tertinggi sepanjang 2022-2023 dengan capaian 15,23 persen (Kota Balikpapan dalam angka, 2023).

Undang-undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pasal 114 dan Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi Pasal 75 mengamanatkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban membangun, menyusun, dan mengembangkan Sistem Informasi Pangan dan Gizi yang terintegrasi, yang dapat digunakan untuk perencanaan, pemantauan dan evaluasi, stabilisasi pasokan dan harga pangan serta sebagai sistem peringatan dini terhadap masalah pangan dan kerawanan pangan dan gizi. Informasi tentang ketahanan dan kerentanan pangan penting untuk memberikan informasi kepada para pembuat keputusan dalam pembuatan program dan kebijakan, baik di tingkat pusat maupun tingkat lokal, untuk lebih memprioritaskan intervensi dan program berdasarkan kebutuhan dan potensi dampak kerawanan pangan yang tinggi. Informasi tersebut dapat dimanfaatkan sebagai salah satu instrumen untuk mengelola krisis pangan dalam rangka upaya perlindungan/penghindaran dari krisis pangan dan gizi baik jangka pendek, menengah maupun panjang. Peraturan kepala badan pangan nasional nomor 10 tahun 2022 tentang tata cara penyusunan Peta ketahanan dan Kerentanan Pangan.

Dalam rangka menyediakan informasi ketahanan pangan yang akurat dan komprehensif, disusunlah Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan/*Food Security and Vulnerability Atlas-FSVA* sebagai instrumen untuk monitoring ketahanan pangan wilayah. Di tingkat nasional FSVA disusun sejak tahun 2002 bekerja sama dengan *World Food Programme (WFP)*. Kerjasama tersebut telah menghasilkan Peta Kerawanan Pangan (*Food Insecurity Atlas - FIA*) pada tahun 2005. Pada tahun 2009, 2015, 2018 disusun Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas – FSVA*).

Sebagai tindak lanjut penyusunan FSVA Nasional disusun pula FSVA Provinsi dengan analisis sampai tingkat kecamatan dan FSVA Kota dengan analisis sampai tingkat kelurahan. Dengan demikian, permasalahan pangan dapat dideteksi secara cepat sampai level yang paling bawah. FSVA Kota ini mulai disusun tahun 2021. Untuk mengakomodir perkembangan situasi ketahanan pangan dan pemekaran wilayah kelurahan, maka dilakukan pemutakhiran FSVA Kota pada tahun 2024.

Seperti halnya FSVA Nasional dan Provinsi, FSVA Kota menyediakan sarana bagi para pengambil keputusan untuk secara cepat dalam mengidentifikasi daerah yang lebih rentan, dimana investasi dari berbagai sektor seperti pelayanan jasa, pembangunan manusia dan infrastruktur yang berkaitan dengan ketahanan pangan dapat memberikan dampak yang lebih baik terhadap penghidupan, ketahanan pangan dan gizi masyarakat pada tingkat kelurahan.

Pengembangan FSVA Kota merupakan hal yang sangat penting, dimana kondisi ekologi yang membentang dari timur ke barat, kondisi iklim yang dinamis dan keragaman sumber penghidupan masyarakat menunjukkan adanya perbedaan situasi ketahanan pangan dan gizi di masing-masing wilayah. FSVA Kota akan menjadi alat yang sangat penting dalam perencanaan dan pengambilan keputusan untuk mengurangi kesenjangan ketahanan pangan.

## 1.2 KERANGKA KONSEP KETAHANAN PANGAN DAN GIZI

Peran pangan bukan hanya penting untuk memenuhi kebutuhan fisik dasar dan mencegah kelaparan, namun lebih jauh dari itu peran pangan dengan kandungan gizi di dalamnya bagi kecerdasan bangsa dan peningkatan kualitas hidup manusia untuk menghasilkan manusia yang sehat, cerdas, aktif dan produktif seperti disebutkan dalam definisi ketahanan pangan. Kecukupan pemenuhan pangan dalam jumlah dan mutunya berkorelasi dengan produktivitas kerja dan pertumbuhan otak serta kecerdasan dan pada akhirnya berperan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam undang-undang di definisikan bahwa kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang Ketahanan pangan adalah tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Menimbang pentingnya ketahanan pangan dalam pembangunan nasional, Bab III Undang-undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 mengamanatkan bahwa Pemerintah harus melakukan perencanaan penyelenggaraan pangan. Pada pasal 6, penyelenggaraan pangan diarahkan untuk mewujudkan kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan.

Definisi ketahanan pangan (*food security*) yang dianut oleh *Food and Agricultural Organisation* (FAO) dan dirujuk oleh UU Pangan saat ini mengacu pada konsep awal *food security* yang dihasilkan oleh *World Food Summit* tahun 1996. Merujuk pada konsep tentang pentingnya *nutrition security* yang diajukan oleh Unicef pada awal tahun 1990an yang menambahkan aspek penyakit infeksi sebagai penyebab masalah gizi di samping ketahanan pangan rumah tangga, maka *International Food Policy Research Institute* (IFPRI) menyebut konsep ketahanan pangan FAO tersebut sebagai *Food and Nutrition Security*. Pada tahun 2012 FAO mengajukan definisi *food security* menjadi *food and nutrition security* untuk menyempurnakan konsep dan definisi sebelumnya.

Upaya FAO ini sejalan dengan upaya *Standing Committee on Nutrition* (SCN), suatu lembaga non struktural yang juga berada di bawah *United Nations* (PBB) yang pada tahun 2013 juga merekomendasikan penyempurnaan definisi ketahanan pangan (*food security*) menjadi ketahanan pangan dan gizi (*food and nutrition security*). Dalam pemahaman baru ini, perwujudan ketahanan pangan tidak hanya berorientasi pada upaya penyediaan pangan dalam jumlah yang cukup bagi setiap individu, namun juga harus disertai upaya untuk meningkatkan efektivitas pemanfaatan pangan bagi terciptanya status gizi yang baik bagi setiap individu. Dalam konteks ini optimalisasi utilisasi pangan tidak cukup hanya dari kualitas pangan yang dikonsumsi, namun juga harus didukung oleh terhindarnya setiap individu dari penyakit infeksi yang dapat mengganggu tumbuh kembang dan kesehatan melalui kecukupan air bersih dan kondisi sanitasi lingkungan dan *higiene* yang baik. Kerangka pikir ketahanan pangan dan gizi ini dituangkan dalam Gambar 1.



2. Gambar 1. Kerangka Konseptual Ketahanan Pangan dan Gizi

Gambar 1. Kerangka Konseptual Ketahanan Pangan dan Gizi

Analisis dan pemetaan FSVA dilakukan berdasarkan pada pemahaman mengenai **ketahanan pangan dan gizi** seperti yang tercantum dalam Kerangka Konsep Ketahanan Pangan dan Gizi (Gambar 1). Kerangka konseptual tersebut dibangun berdasarkan tiga pilar ketahanan pangan, yaitu: ketersediaan, akses dan pemanfaatan pangan, serta mengintegrasikan gizi dan kerentanan di dalam keseluruhan pilar tersebut.

**Ketersediaan pangan** adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri, cadangan pangan, serta pemasukan pangan (termasuk di dalamnya impor dan bantuan pangan) apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan. Ketersediaan pangan dapat dihitung pada tingkat nasional, regional, kecamatan dan tingkat masyarakat.

**Akses pangan** adalah **kemampuan rumah tangga untuk memperoleh** cukup pangan yang bergizi, melalui satu atau kombinasi dari berbagai sumber seperti: produksi dan persediaan sendiri, pembelian, barter, hadiah, pinjaman dan bantuan pangan. Pangan mungkin tersedia di suatu daerah tetapi tidak dapat diakses oleh rumah tangga tertentu jika mereka tidak mampu secara fisik, ekonomi atau sosial, mengakses jumlah dan keragaman makanan yang cukup.

Pemanfaatan **pangan** merujuk pada **penggunaan pangan oleh rumah tangga** dan **kemampuan individu** untuk menyerap dan memetabolisme zat gizi. Pemanfaatan pangan juga meliputi cara penyimpanan, pengolahan dan penyiapan makanan, keamanan air untuk minum dan memasak, kondisi kebersihan, kebiasaan pemberian makan (terutama bagi individu dengan kebutuhan makanan khusus), distribusi makanan dalam rumah tangga sesuai dengan kebutuhan individu (pertumbuhan, kehamilan dan menyusui), dan status kesehatan setiap anggota rumah tangga. Mengingat peran yang besar dari seorang ibu dalam meningkatkan profil gizi keluarga, terutama untuk bayi dan anak-anak, pendidikan ibu sering digunakan sebagai salah satu *proxy* untuk mengukur pemanfaatan pangan rumah tangga.

Dampak **gizi dan kesehatan** merujuk pada status gizi individu, termasuk defisiensi mikronutrien, pencapaian morbiditas dan mortalitas. Faktor-faktor yang berhubungan dengan pangan, serta praktek-praktek perawatan umum, memiliki kontribusi terhadap dampak keadaan gizi pada kesehatan masyarakat dan penanganan penyakit yang lebih luas.

Kerentanan dalam peta ini selanjutnya merujuk pada kerentanan terhadap **kerawanan pangan dan gizi**. Tingkat kerentanan individu, rumah tangga atau kelompok masyarakat ditentukan oleh pemahaman terhadap faktor-faktor risiko dan kemampuan untuk mengatasi situasi tertekan.

Kerawanan pangan dapat menjadi kondisi yang kronis atau transien. **Kerawanan pangan kronis** adalah ketidakmampuan jangka panjang untuk memenuhi kebutuhan pangan minimum dan biasanya berhubungan dengan struktural dan faktor-faktor yang tidak berubah dengan cepat, seperti iklim setempat, jenis tanah, sistem pemerintahan daerah, infrastruktur publik, sistem kepemilikan lahan, distribusi pendapatan dan mata pencaharian, hubungan antar suku, tingkat pendidikan, sosial budaya/adat istiadat dan lain lain.

**Kerawanan pangan transien** adalah ketidakmampuan sementara yang bersifat jangka pendek untuk memenuhi kebutuhan pangan minimum yang sebagian besar berhubungan dengan faktor dinamis yang dapat berubah dengan cepat/tiba-tiba seperti penyakit menular, bencana alam, pengungsian, perubahan fungsi pasar, tingkat hutang dan migrasi. Perubahan faktor dinamis tersebut umumnya menyebabkan kenaikan harga pangan yang lebih mempengaruhi penduduk miskin dibandingkan penduduk kaya, mengingat sebagian besar dari pendapatan penduduk miskin digunakan untuk membeli makanan. Kerawanan pangan transien yang berulang dapat menyebabkan kerawanan aset rumah tangga, menurunnya ketahanan pangan dan akhirnya dapat menyebabkan kerawanan pangan kronis.

### 1.3 METODOLOGI

Kerentanan pangan dan gizi adalah masalah multi-dimensional yang memerlukan analisis dari sejumlah parameter. Kompleksitas masalah ketahanan pangan dan gizi dapat dikurangi dengan mengelompokkan indikator *proxy* ke dalam tiga kelompok yang berbeda tetapi saling berhubungan, yaitu ketersediaan pangan, keterjangkauan/akses rumah tangga terhadap pangan dan pemanfaatan pangan secara individu. Pertimbangan gizi, termasuk ketersediaan dan keterjangkauan bahan pangan bergizi tersebar dalam ketiga kelompok tersebut.

#### Indikator

Kerentanan terhadap kerawanan pangan tingkat nasional, provinsi maupun Kota, memiliki karakteristik masing-masing sehingga tidak semua indikator nasional maupun provinsi dapat digunakan untuk memetakan kerentanan terhadap kerawanan pangan di tingkat Kota. Pemilihan indikator FSVA Kota didasarkan pada: (i) hasil review terhadap pemetaan daerah rentan rawan pangan yang telah dilakukan sebelumnya; (ii) tingkat sensitivitas dalam mengukur situasi ketahanan pangan dan gizi; (iii) keterwakilan pilar ketahanan pangan dan gizi; dan (iv) ketersediaan data pada seluruh kelurahan.

Indikator yang digunakan dalam FSVA Kota terdiri dari 5 (lima) indikator yang mencerminkan tiga aspek ketahanan pangan.

**Tabel 1. Indikator FSVA Kota 2024**

<b>Indikator</b>	<b>Definisi</b>	<b>Sumber Data</b>
<b>A. Aspek Ketersediaan Pangan</b>		
Rasio jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga	Jumlah sarana dan prasarana ekonomi penyedia pangan (pasar, minimarket, toko, warung, restoran dll) dibandingkan jumlah rumah tangga di kelurahan	DPOP, DPMPT, Disdag
<b>B. Aspek Akses terhadap Pangan</b>		
Rasio jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap jumlah penduduk kelurahan	Jumlah penduduk dengan status kesejahteraan terendah (jumlah penerima PKH) dibandingkan jumlah penduduk kelurahan	Dinas Sosial, 2023
Kelurahan yang tidak memiliki akses penghubung memadai melalui darat, air atau udara	Kelurahan yang tidak memiliki akses penghubung memadai dengan kriteria: (1) Kelurahan dengan sarana transportasi darat tidak dapat dilalui sepanjang tahun; (2) Kelurahan dengan sarana transportasi air atau udara namun tidak tersedia angkutan umum	DPU, Keputusan Tim Penyusun FSVA
<b>C. Aspek Pemanfaatan Pangan</b>		
Rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga di kelurahan	Jumlah rumah tangga dengan sumber air bersih tidak terlindung dibandingkan jumlah rumah tangga kelurahan	DPU

Rasio jumlah tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk kelurahan	Jumlah tenaga kesehatan terdiri atas: 1) Dokter umum/spesialis; 2) dokter gigi; 3) bidan; 4) tenaga kesehatan lainnya dibandingkan jumlah penduduk kelurahan	Dinas Kesehatan, 2023
--	---	-----------------------

## Metode Analisis

### 1. Analisis Indikator Individu

Analisis indikator individu dilakukan dengan mengelompokkan indikator individu kedalam beberapa kelas berdasarkan metode sebaran empiris. Sementara itu data kategorik mengikuti standar pengelompokkan yang sudah ditetapkan oleh BPS.

### 2. Analisis Komposit

Metodologi yang diadopsi untuk analisis komposit adalah dengan menggunakan metode pembobotan. Metode pembobotan digunakan untuk menentukan tingkat kepentingan relatif indikator terhadap masing-masing aspek ketahanan pangan. Metode pembobotan dalam penyusunan FSVA mengacu pada metode yang dikembangkan oleh *The Economist Intelligence Unit* (EIU) dalam penyusunan *Global Food Security Index* (EIU 2016 dan 2017) dan *International Food Policy Research Institute* (IFPRI) dalam penyusunan *Global Hunger Index* (IFPRI 2017). Goodridge (2007) menyatakan jika variabel yang digunakan dalam perhitungan indeks berbeda, maka perlu dilakukan secara tertimbang (pembobotan) untuk membentuk indeks agregat yang disesuaikan dengan tujuannya.

Langkah-langkah perhitungan analisis komposit adalah sebagai berikut:

- . Standarisasi nilai indikator dengan menggunakan *z-score* dan *distance to scale* (0 – 100)
- a. Menghitung skor komposit Kota/kota dengan cara menjumlahkan hasil perkalian antara masing-masing nilai indikator yang sudah distandarisasi dengan bobot indikator, dengan rumus:

$$Y_j = \sum_{i=1}^5 a_i X_{ij} \quad (1)$$

Dimana:

$Y_j$  : Skor komposit Kota/kota ke-j

$a_i$  : Bobot masing-masing indikator

$X_{ij}$  : Nilai standarisasi masing-masing indikator pada Kota/kota ke-j

$i$  : Indikator ke-1,2, ...5

$j$  : Kelurahan ke 1, 2, ... 34

Besaran bobot masing-masing indikator dibagi sama besar untuk setiap aspek ketahanan pangan, karena setiap aspek memiliki peran yang sama besar terhadap penentuan ketahanan pangan wilayah. Bobot untuk setiap indikator mencerminkan signifikansi atau pentingnya indikator tersebut dalam menentukan tingkat ketahanan pangan suatu wilayah.

**Tabel 2. Bobot Indikator Individu**

No	Indikator	Bobot	
		Kabupaten	Kota
1.	Rasio luas lahan pertanian terhadap jumlah penduduk	1/6	-
2.	Rasio jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga	1/6	1/3
<b>Sub Total</b>		<b>1/3</b>	<b>1/3</b>
3.	Rasio jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap jumlah penduduk kelurahan	1/6	1/6
4.	Desa yang tidak memiliki akses penghubung memadai melalui darat atau air atau udara	1/6	1/6
<b>Sub Total</b>		<b>1/3</b>	<b>1/3</b>
5.	Rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga kelurahan	1/6	1/6
6.	Rasio jumlah tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk kelurahan	1/6	1/6
<b>Sub Total</b>		<b>1/3</b>	<b>1/3</b>

- b. Mengelompokkan kelurahan ke dalam 6 kelompok prioritas berdasarkan *cut off point* komposit. Skor komposit yang dihasilkan pada masing-masing wilayah dikelompokkan ke dalam 6 kelompok berdasarkan *cut off point* komposit. *Cut off point* komposit merupakan hasil penjumlahan dari masing-masing perkalian antara bobot indikator individu dengan *cut off point* indikator individu hasil standarisasi *z-score* dan *distance to scale* (0-100).

$$K_j = \sum_{i=1}^5 a_i C_{ij} \dots \dots \dots (2)$$

Dimana:

$K_j$  : *cut off point* komposit ke-J

$a_i$  : Bobot indikator ke-i

$C_{ij}$  : Nilai standarisasi *cut off point* indikator ke-I kelompok ke-j

$i$  : indikator ke 1, 2, 3, ...5

$j$  : komposit ke 1, 2, 3, ... 6

Wilayah yang masuk ke dalam kelompok prioritas 1 adalah kelurahan yang cenderung memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi daripada kelurahan dengan kelompok di atasnya, sebaliknya wilayah pada kelompok prioritas 6 merupakan kelurahan yang memiliki ketahanan pangan paling baik. Penting untuk menegaskan kembali bahwa sebuah kelurahan yang diidentifikasi sebagai relatif lebih tahan pangan (kelompok Prioritas 4-6), tidak berarti semua penduduk di dalamnya juga tahan pangan. Demikian juga, tidak semua penduduk di kelurahan Prioritas 1-3 tergolong rentan pangan.

**Tabel 3. Keterangan dan Pola Warna FSVA**

No	Uraian	Makna	Pola Warna Peta (RGB)	Kode Warna
1	Prioritas 1	Sangat Rentan	R:110, G:31, B: 31	#6e1f1f
2	Prioritas 2	Rentan	R:232, G: 89, B: 97	#e85961
3	Prioritas 3	Agak Rentan	R:244, G: 161, B: 167	#f4a1a7
4	Prioritas 4	Agak Tahan	R: 201, G: 224, B: 119	#c9e077
5	Prioritas 5	Tahan	R: 148, G: 201, B: 69	#94c945
6	Prioritas 6	Sangat Tahan	R: 59, G: 112, B: 59	#3b703b

### 3. Pemetaan

Hasil analisis indikator individu dan komposit kemudian divisualisasikan dalam bentuk peta. Peta-peta yang dihasilkan menggunakan pola warna seragam dalam gradasi warna merah dan hijau. Gradasi merah menunjukkan variasi tingkat kerentanan pangan tinggi dan gradasi hijau menggambarkan variasi kerentanan pangan rendah. Untuk kedua kelompok warna tersebut, warna yang semakin tua menunjukkan tingkat yang lebih tinggi dari ketahanan atau kerentanan pangan.

## BAB 2 KETERSEDIAAN PANGAN

Undang-undang Pangan No. 18 tahun 2012 mendefinisikan ketersediaan pangan sebagai kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan. Produksi pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk Pangan. Sedangkan cadangan pangan nasional adalah persediaan pangan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk konsumsi manusia dan untuk menghadapi masalah kekurangan pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat. Penyediaan pangan diwujudkan untuk memenuhi kebutuhan dan konsumsi pangan bagi masyarakat, rumah tangga dan perseorangan secara berkelanjutan.

Mayoritas bahan pangan yang diproduksi maupun didatangkan dari luar wilayah harus masuk terlebih dahulu ke pasar sebelum sampai ke rumah tangga. Oleh karena itu, selain kapasitas produksi pangan, keberadaan sarana dan prasarana penyedia pangan seperti pasar akan terkait erat dengan ketersediaan pangan di suatu wilayah.

### 2.1 SARANA DAN PRASARANA PENYEDIA PANGAN

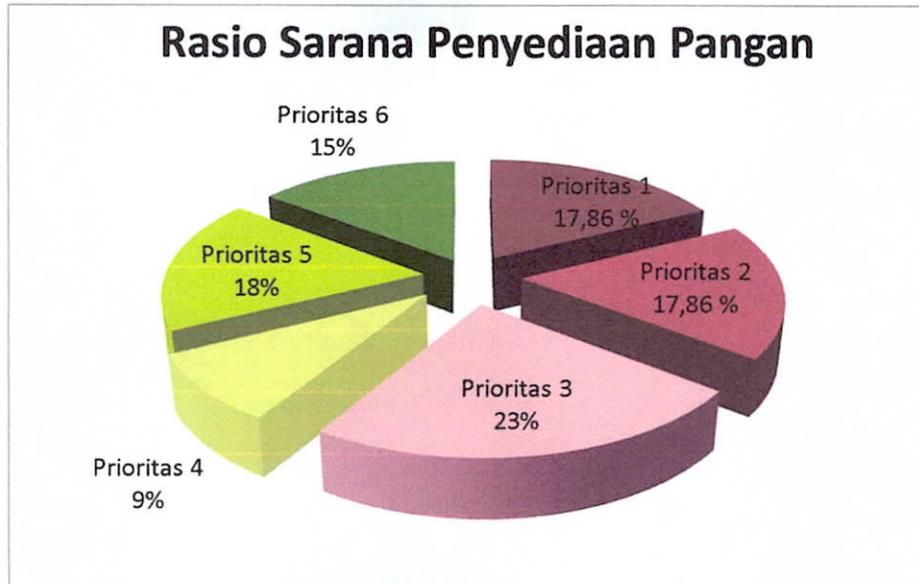
Rasio jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga adalah perbandingan antara jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan (pasar, minimarket, toko, warung, restoran, kelompok pertokoan, hotel, penginapan) dengan jumlah rumah tangga di kelurahan. Sarana dan prasarana penyedia pangan diasumsikan sebagai tempat penyimpan pangan (stok pangan) yang diperoleh dari petani sebagai produsen pangan maupun dari luar wilayah, yang selanjutnya disediakan bagi masyarakat untuk konsumsi. Oleh karena itu, semakin tinggi rasio sarana dan prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga di kelurahan maka diasumsikan semakin baik tingkat ketersediaan pangan di kelurahan tersebut. Sarana dan Prasarana Penyedia Pangan ini merupakan bobot indikator terbesar dalam perhitungan FSVA. Pada rasio jumlah sarana dan prasarana ini dilakukan pembentukan cut off baru dikarenakan perbedaan data yang cukup besar dibandingkan data tahun sebelumnya. Agar lebih bervariasi maka dilakukan cut off baru untuk rasio Sarana dan Prasarana Penyedia pangan.

**Tabel 4. Sebaran Rasio Sarana Prasarana Penyedia Pangan berdasarkan Prioritas**

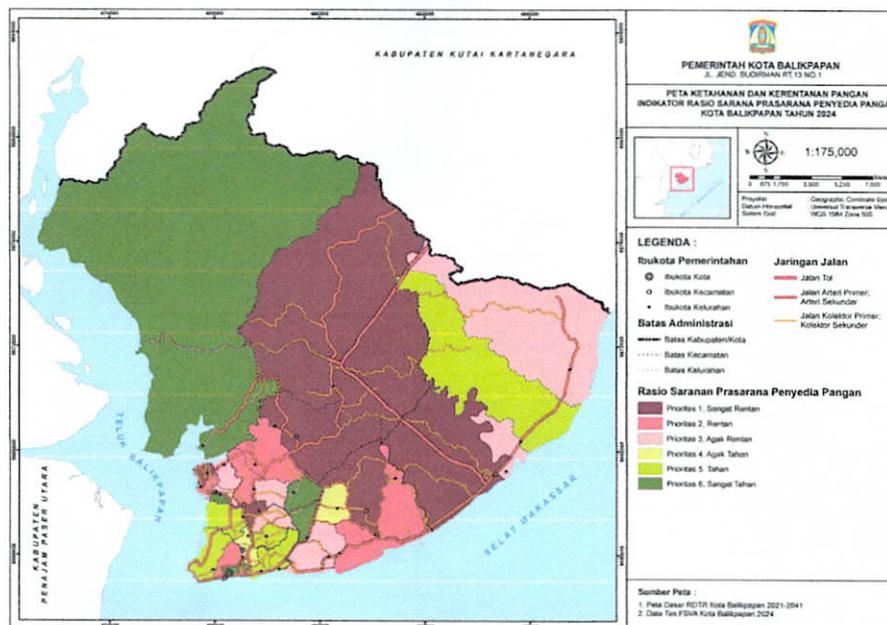
No.	Prioritas	Rasio Sarana Penyedia Pangan	Jumlah Kelurahan	Persentase (%)
1	Prioritas 1	$\leq 0,0299$	6	17,6
2	Prioritas 2	$> 0, 0299$	6	17,6
3	Prioritas 3	$> 0,0259$	8	23,5
4	Prioritas 4	$> 0,0307$	3	8,8
5	Prioritas 5	$> 0,0344$	6	17,6
6	Prioritas 6	$> 0,0417$	5	14,7

Sumber: FSVA Kota Balikpapan 2024, Diolah.

Dari 34 Kelurahan di Kota Balikpapan, 6 kelurahan masuk dalam prioritas 1 (17,6 %), 6 kelurahan prioritas 2 (17,6 %) dan 8 kelurahan prioritas 3 (23,5 %).



Gambar 2. Prosentase Kelurahan dengan Indikator Ketersediaan Sarana Penyedia Pangan



Peta 1. Peta Kelurahan dengan Indikator Sarana Penyedia Pangan

## 2.3 STRATEGI PEMENUHAN KETERSEDIAAN PANGAN

Laju pertumbuhan penduduk Kota Balikpapan dari tahun 2022 ke 2023 mencapai 1,49 persen dengan kepadatan penduduk sebesar 1.467 jiwa per km<sup>2</sup>. Rasio sarana ekonomi penyedia pangan pada prioritas 1-3 mencapai 58,7%. Jumlah ini mengalami kenaikan di tahun sebelumnya hal ini dikarenakan adanya perbaikan data cut off dari data yang kami peroleh untuk dimutakhirkan pada penyusunan FSVA tahun 2024. Selain itu juga hal tersebut menjadi tantangan dalam pemenuhan ketersediaan pangan.

### **Strategi untuk Meningkatkan Ketersediaan Pangan.**

1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Penyediaan Pangan melalui kemudahan dalam izin berusaha maupun pembangunan pasar dan pertokoan.
2. Optimalisasi penggunaan lahan Pekarangan di lingkungan.
3. Pelaksanaan Gelar pasar murah untuk memudahkan penyediaan sarana prasarana pangan.
4. Peningkatan ekonomi Masyarakat melalui sektor-sektor pengelolaan Pariwisata.
5. Penetapan Kawasan yang telah ditetapkan sebagai LP2B dalam revisi RTRW sebagai fokus pemerintah Kota dalam mengatur dan memberikan perlindungan terhadap keberlangsungan lahan pangan berkelanjutan khususnya di Balikpapan Timur.
6. Peningkatan Peran BUMD di Kota Balikpapan dalam penyediaan sarana pangan dan stabilisasi pasokan dan harga pangan.
7. Peningkatan akses jalan pertanian dan perikanan yang akan mengembangkan serta menumbuhkan sektor penyediaan pangan.
8. Pembangunan pasar di wilayah daerah rentan pangan.
9. Peningkatan akses pasar Karang joang sehingga dapat merangsang jumlah pembeli di wilayah sekitar.
10. Peningkatan perekonomian dengan pengembangan sektor wisata pasar terapung di kelurahan Baru Tengah dapat mentrigger pertumbuhan sarana penyediaan pangan.
11. Pembangunan lahan pekarangan pada Pondok Pesantren Hidayatullah untuk menambah ketersediaan pangan khusus di wilayah teritip yang masuk dalam daerah rentan pangan.
12. Mendorong pembangunan infrastruktur pergudangan maupun sarana penyimpanan pangan di Kota Balikpapan
13. Mendorong partisipasi penyediaan pangan mandiri masyarakat melalui *urban farming*.

## BAB 3 AKSES TERHADAP PANGAN

Keterjangkauan pangan atau akses terhadap pangan adalah kemampuan rumah tangga untuk memperoleh cukup pangan, baik yang berasal dari produksi sendiri, stok, pembelian, barter, hadiah, pinjaman dan bantuan pangan. Pangan mungkin tersedia di suatu wilayah tetapi tidak dapat diakses oleh rumah tangga tertentu karena terbatasnya: (1) **Akses ekonomi:** kemampuan keuangan untuk membeli pangan yang cukup dan bergizi; (2) **Akses fisik:** keberadaan infrastruktur untuk mencapai sumber pangan; dan/atau (3) **Akses sosial:** modal sosial yang dapat digunakan untuk mendapatkan dukungan informal dalam mengakses pangan, seperti barter, pinjaman atau program jaring pengaman sosial. Dalam penyusunan FSVA Kota, indikator yang digunakan dalam aspek keterjangkauan pangan hanya mewakili akses ekonomi dan fisik saja, yaitu: (1) Rasio jumlah penduduk Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan terhadap jumlah penduduk kelurahan; dan (2) Kelurahan yang tidak memiliki akses penghubung memadai melalui darat, air atau udara.

### 3.1 PENDUDUK DENGAN TINGKAT KESEJAHTERAAN TERENDAH

Berbagai program penanggulangan kemiskinan sudah dijalankan oleh pemerintah termasuk Pemerintah Kota Balikpapan. Persentase kemiskinan telah berkurang dalam beberapa tahun terakhir, jumlah penduduk miskin Kota Balikpapan terus mengalami penurunan dari 2,82% (17.550 jiwa) tahun 2016 menjadi 2,31% tahun 2023 (Balikpapan dalam angka, 2023). Dalam 6 tahun terakhir persentase penduduk miskin tertinggi pada tahun 2021 sebesar 2,89%. Dalam Profil Kemiskinan Kota Balikpapan Tahun 2023, Kota Balikpapan menduduki angka kemiskinan terkecil di Kalimantan Timur.

**Tabel 5. Persentase Populasi di Bawah Garis Kemiskinan Kota Balikpapan**

Keterangan	Tahun					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase penduduk miskin (%)	2,64	2,42	2,57	2,89	2,45	2,31

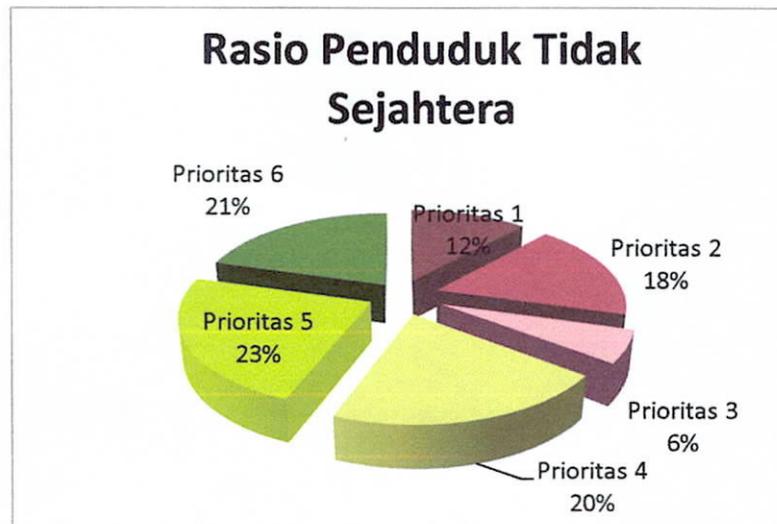
*Sumber: Kota Balikpapan Dalam Angka, 2023 dan Profil Kemiskinan Kota Balikpapan Tahun 2023.*

Pada tingkat kelurahan berdasarkan Data Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan tahun 2023 (**Dinas Sosial Kota Balikpapan, 2023**), ada 4 kelurahan di Kota Balikpapan berada pada kategori prioritas 1. Oleh karena itu, program-program penanggulangan kemiskinan Kota Balikpapan ke depan masih harus ditingkatkan dan diprioritaskan.

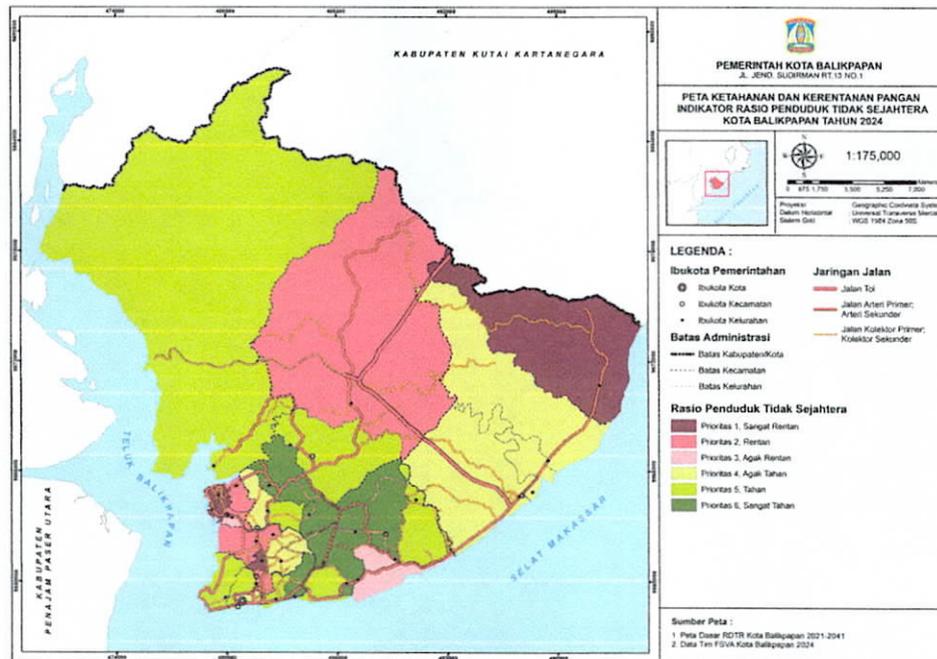
**Tabel 6. Sebaran Kelurahan dengan Tingkat Kesejahteraan Terendah berdasarkan Skala Prioritas**

Prioritas	Range	Jumlah Kelurahan	Persentase
1	0.0137 ke atas	4	11,8
2	0,0099 - 0,00137	6	17,6
3	0,0079 - 0,0099	2	5,9
4	0,0060 - 0,0079	7	20,6
5	0,0037 - 0,0060	8	23,5
6	< 0,00037	7	20,6

Sumber: FSVA Kota Balikpapan 2024, Diolah.



**Gambar 3. Prosentase Kelurahan dengan Indikator Penduduk dengan Tingkat Kesejahteraan Terendah**



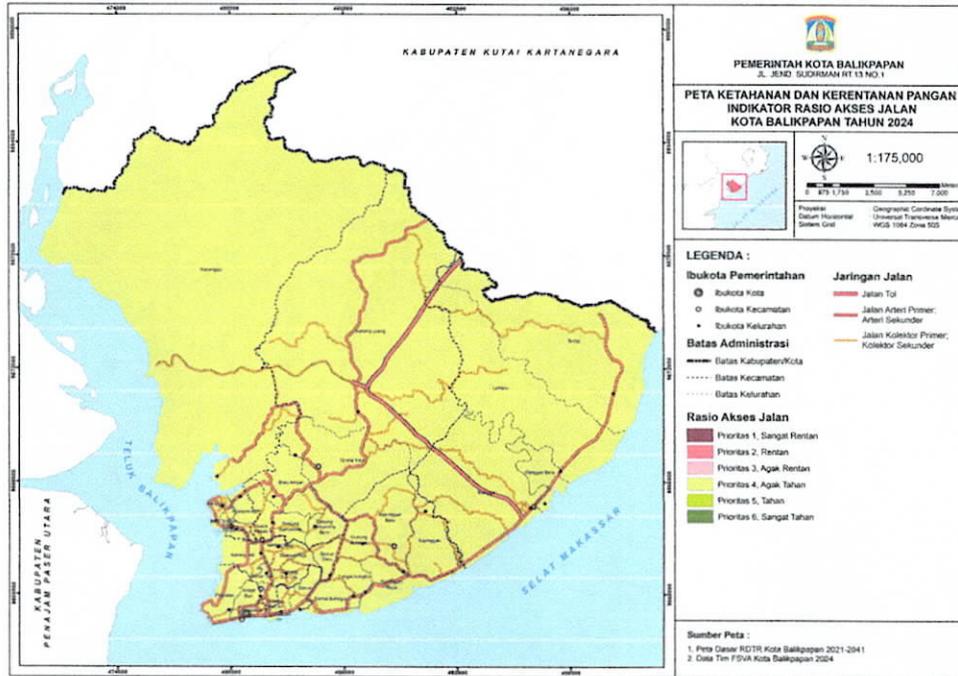
Peta 2. Peta Kelurahan dengan Indikator Kesejahteraan Penduduk

Strategi penurunan tingkat kesejahteraan terendah sebagai berikut:

1. Adanya pemenuhan kebutuhan hidup keluarga penerima manfaat (KPM) Program PKH melalui Ketahanan finansial dan bantuan sembako.
2. Peningkatan keterampilan dan keahlian bagi usia produktif kategori miskin..
3. Fasilitasi pertumbuhan lapangan usaha mandiri bagi penduduk kategori kesejahteraan rendah melalui program Kelompok Usaha Bersama (KUBE).
4. Membuka peluang kerja bagi penduduk KTP Balikpapan
5. Penyaluran Cadangan pangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah kepada masyarakat tingkat kesejahteraan rendah
6. Melanjutkan bantuan jaminan BPJS kesehatan Kelas III penerima bantuan iuran non pekerja.
7. Pengalokasian dana Bosda dari APBD untuk peserta didik warga Kota Balikpapan
8. Penyediaan peluang kerja program padat karya untuk wilayah Kota Balikpapan khusus daerah rentan pangan.
9. Meningkatkan peran PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) dalam pemberdayaan masyarakat setempat melalui kader PKK dan Posyandu.
10. Pelatihan tenaga kerja melalui BLK untuk mengisi peluang kerja di wilayah Kota Balikpapan.
11. Pendirian Kelompok Usaha Bersama (KUBE) bagi masyarakat miskin dan rentan miskin di bidang Pertanian, Perkebunan dan Peternakan.

### 3.2 AKSES TRANSPORTASI

Berdasarkan data dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Kota Balikpapan, semua kelurahan memiliki akses penghubung bagi kendaraan roda 4 sepanjang tahun kecuali saat tertentu. Jalan merupakan moda transportasi utama di Kota Balikpapan.



Peta 3. Peta Kelurahan dengan Indikator Akses Jalan

### 3.3 STRATEGI PENINGKATAN AKSES PANGAN

#### Strategi Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Akses terhadap Pangan

Strategi Pemerintah Daerah Kota Balikpapan untuk menanggulangi kemiskinan seperti yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan tahun 2021-2026 di antaranya:

- Mendorong kemandirian pangan masyarakat melalui urban farming
  - mengembangkan sentra industri dan produk ekonomi lokal
  - Keterpaduan program untuk peningkatan keterampilan dan perluasan akses modal serta memperluas perlindungan dan jaminan sosial.
  - Memperluas kesempatan kerja dengan meningkatkan kewirausahaan
- Melalui peningkatan akses pangan ini telah dibangunnya beberapa wilayah yang menghubungkan beberapa kelurahan di Kota Balikpapan yang dapat memicu perekonomian serta aksesibility di Kota Balikpapan.

## **BAB IV**

### **PEMANFAATAN PANGAN**

Aspek ketiga dari konsep ketahanan pangan adalah pemanfaatan pangan. Pemanfaatan pangan meliputi: (1) Pemanfaatan pangan yang bisa di akses oleh rumah tangga; dan (2) Kemampuan individu untuk menyerap zat gizi secara efisien oleh tubuh. Pemanfaatan pangan juga meliputi cara penyimpanan, pengolahan, dan penyajian makanan termasuk penggunaan air selama proses pengolahannya serta kondisi budaya atau kebiasaan dalam pemberian makanan terutama kepada individu yang memerlukan jenis pangan khusus sesuai dengan kebutuhan masing-masing individu (seperti saat masa pertumbuhan, kehamilan, menyusui, dll) atau status kesehatan masing-masing individu. Dalam penyusunan FSVA Kota, aspek pemanfaatan pangan meliputi indikator sebagai berikut: (1) Rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga; dan (2) Rasio jumlah tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk.

#### **4.1 AKSES TERHADAP AKSES AIR BERSIH**

Rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga merupakan perbandingan antara jumlah rumah tangga dengan sumber air bersih tidak terlindungi dengan jumlah rumah tangga di kelurahan. Air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak. Sumber air bersih yang tidak terlindungi berpotensi meningkatkan angka kesakitan serta menurunkan kemampuan dalam menyerap makanan yang pada akhirnya akan mempengaruhi status gizi individu. Dari table 7 dan hasil pemetaan memberikan informasi seluruh kelurahan di Kota Balikpapan masih terapat rumah tangga menggunakan sumber air bersih tidak terlindungi untuk keperluan sehari-hari. Tidak adanya prioritas 5 dan prioritas 6 ini karena range perbandingannya dengan jumlah rumah tangga 0. yang mana sampai saat ini penduduk dengan menggunakan sumber air bersih tidak terlindungi masih terdapat diseluruh kelurahan.

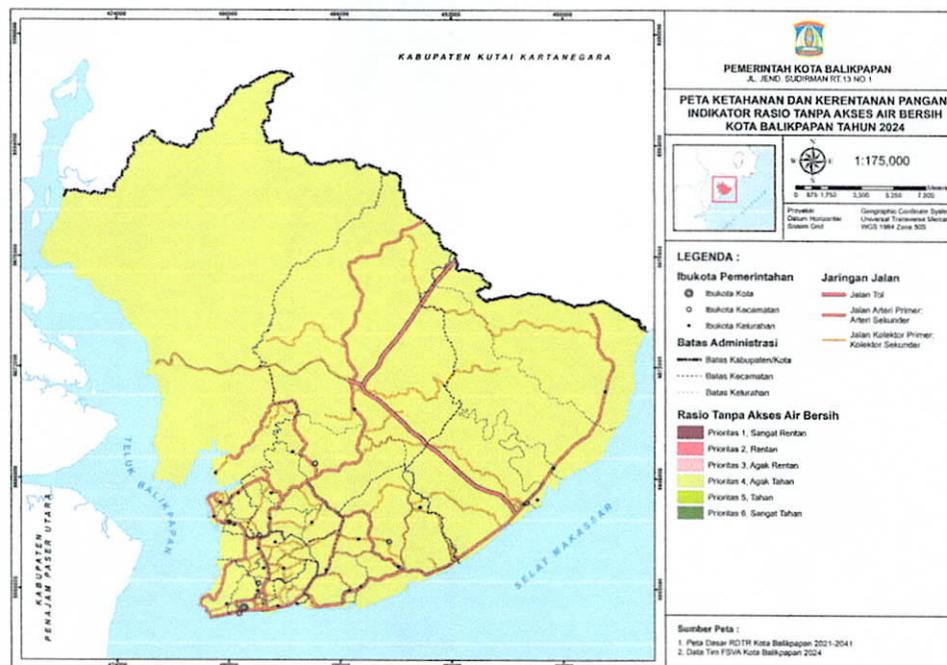
**Tabel 7. Sebaran Kelurahan berdasarkan Rumah Tangga tanpa Akses Air Bersih berdasarkan Skala Prioritas**

<b>Prioritas</b>	<b>Range</b>	<b>Jumlah Kelurahan</b>	<b>Persentase (%)</b>
1	0,0254 ke atas	0	0
2	0,0142 - 0,0247	0	0
3	0,0033 - 0,0142	0	0
4	0,0000 - 0,0033	34	100
5	0,0000 - 0,0000	0	0
6	< 0,0000	0	0

Sumber: FSVA Kota Balikpapan 2024, Diolah.



Gambar 4. Prosentase Kelurahan dengan Indikator Akses terhadap Air Bersih



Peta 4. Peta Kelurahan dengan Indikator Akses Air Bersih

### 4.3 RASIO TENAGA KESEHATAN

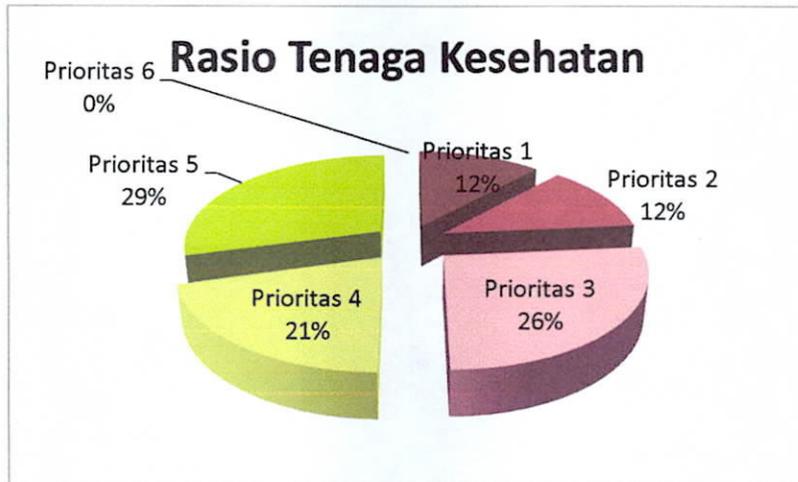
Rasio jumlah tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk adalah jumlah penduduk kelurahan per tenaga kesehatan yang terdiri dari: (1) Dokter umum/spesialis; (2) Dokter gigi; (3) Bidan; (4) Tenaga kesehatan lainnya (Perawat, Tenaga Kesehatan Masyarakat, Tenaga Gizi, Apoteker, Asisten Apoteker, Tenaga Kesehatan Lingkungan, Keterampilan Fisik, Keteknisian Medis, Teknik Biomedik) dibandingkan dengan jumlah penduduk. Tenaga kesehatan berperan penting dalam menurunkan angka kesakitan penduduk (morbiditas) dan meningkatkan pengetahuan masyarakat akan pentingnya makanan yang beragam bergizi seimbang dan aman.

Rasio jumlah tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk merupakan jumlah tenaga kesehatan yang terdaftar dalam seluruh fasilitas kesehatan. Ada beberapa tenaga kesehatan yang melayani di beberapa fasilitas kesehatan lainnya. Rasio jumlah tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk menunjukkan kemampuan jumlah tenaga kesehatan yang ada di wilayah kelurahan untuk melayani masyarakat. Jumlah tenaga kesehatan yang memadai akan meningkatkan status pemanfaatan pangan masyarakat. Dari sebaran rasio tenaga kesehatan dapat kita ketahui ada sekitar 50,1 % kelurahan yang ada di Kota Balikpapan berada pada prioritas 1-3. Sedangkan kelurahan dengan prioritas 1 berada pada kelurahan Lamaru, Teritip, Kariangau, dan Karang Joang. Pada kelurahan ini memiliki jumlah penduduk yang besar dengan luasan wilayah yang cukup luas.

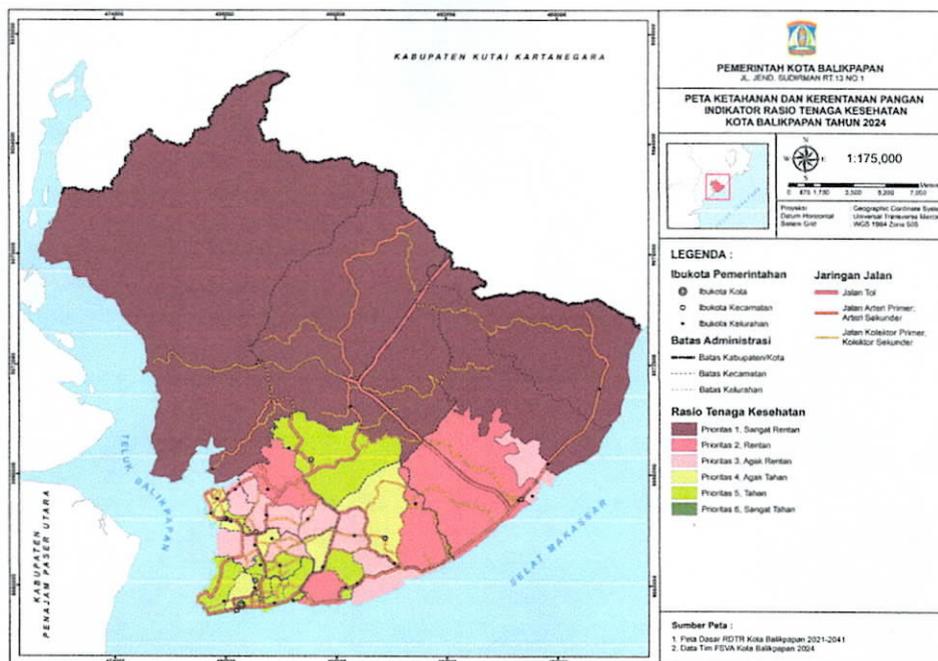
**Tabel 8. Sebaran Rasio Tenaga Kesehatan di Kelurahan berdasarkan Skala Prioritas**

Prioritas	Range	Jumlah Kelurahan	Persentase (%)
1	1,1012 ke atas	4	11,8
2	0,1557 - 1.1012	4	11,8
3	0,0455 - 0,1557	9	26,5
4	0,0248 - 0,0455	7	20,6
5	0,0031 - 0,0248	10	29,4
6	< 0,0031	0	0

Sumber: FSVA Kota Balikpapan 2024, Diolah.



Gambar 5. Prosentase Kelurahan dengan Indikator Rasio Tenaga Kesehatan



Peta 5. Peta Kelurahan dengan Indikator Tenaga Kesehatan

#### 4.4 STRATEGI PENINGKATAN PEMANFAATAN PANGAN

- a. Strategi Peningkatan Akses Air Bersih
  - Pembangunan jalur pipa distribusi air pada daerah-daerah rentan pangan.
  - Pembangunan sarana air bersih sumur dalam untuk daerah yang sukar dijangkau dalam distribusi Perumda Tirta Manuntung.
  - Menjalin Kerjasama dalam rangka pemenuhan air baku baik Pembangunan SPAM Regional (air dari sungai mahakam dialirkan ke bppn) Sepaku Semoi – Balikpapan.
  - Pembangunan Bak Penampungan Air Hujan pada Kantor-Kantor Instansi Pemerintah, sekolah dan rumah tinggal dalam rangka Pemanenan air hujan (PAH)/rain water harvesting (RWH).
  - Memiliki payung hukum dalam Penegasan pencurian air bersih dari Perusda Tirta Manuntung khususnya daerah rentan pangan.
- b. Strategi Peningkatan Tenaga Kesehatan
  - Penambahan tenaga kesehatan Kota Balikpapan melalui peran BKPSDM Kota Balikpapan.
  - Pembangunan Sarana Prasarana kesehatan di wilayah rentan pangan Kota Balikpapan khususnya Kecamatan Balikpapan Utara dan Balikpapan Timur.
  - Membuat usulan penambahan pegawai ke BKPSDM melalui jalur PWK (Pindah Wilayah Kerja) dari daerah lain.
  - Membuka formasi dan usulan ke Pemkot terkait penerimaan CPNS /PPPK tenaga kesehatan untuk kelurahan rentan pangan.
  - Rotasi penugasan tenaga kesehatan pada kelurahan yang rentan Pangan.

## **BAB V**

### **KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN KOMPOSIT**

Sebagaimana disebutkan di dalam Bab 1, bahwa kondisi kerentanan terhadap kerawanan pangan kronis secara komposit ditentukan berdasarkan 6 indikator yang berhubungan dengan ketersediaan pangan, akses pangan, serta pemanfaatan pangan dan gizi, yang dijelaskan secara rinci pada Bab 2, 3 dan 4. Peta kerentanan terhadap kerawanan pangan komposit (Peta 6) ditetapkan melalui Analisis Pembobotan sesuai pada table 2.

#### **5.1 KONDISI KETAHANAN PANGAN**

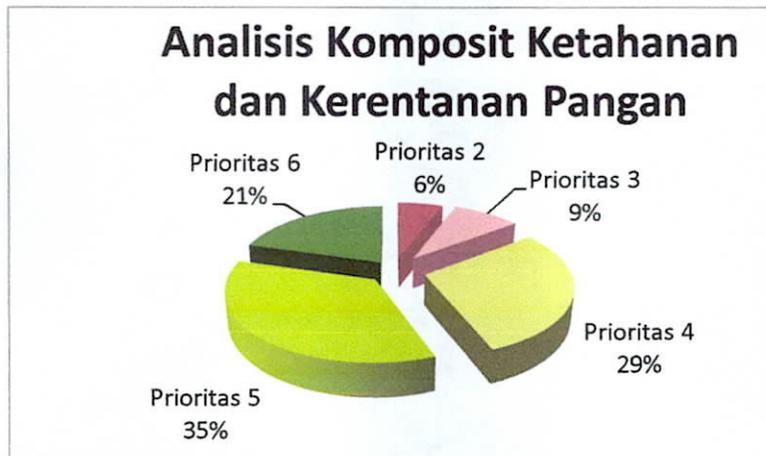
Peta komposit menjelaskan kondisi kerentanan terhadap kerawanan pangan suatu wilayah (kelurahan) yang disebabkan oleh kombinasi dari berbagai dimensi kerawanan pangan. Berdasarkan hasil pembobotan, kelurahan dikelompokkan ke dalam 6 prioritas. Prioritas 1 merupakan prioritas utama yang menggambarkan tingkat kerentanan yang paling tinggi, sedangkan prioritas 6 merupakan prioritas yang relatif lebih tahan pangan. Dengan kata lain, wilayah (kelurahan) prioritas 1 memiliki tingkat resiko kerentanan terhadap kerawanan pangan yang lebih besar dibandingkan wilayah (kelurahan) lainnya sehingga memerlukan perhatian segera. Meskipun demikian, wilayah (kelurahan) yang berada pada prioritas 1 tidak berarti semua penduduknya berada dalam kondisi rawan pangan, juga sebaliknya wilayah (kelurahan) pada prioritas 6 tidak berarti semua penduduknya tahan pangan.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, dari 34 kelurahan yang ada di Kota Balikpapan maka didapatkan 0 kelurahan (Prioritas 1), 2 kelurahan (Prioritas 2), 3 kelurahan (Prioritas 3), 10 kelurahan (Prioritas 4), 12 kelurahan (Prioritas 5) dan 7 kelurahan (Prioritas 6).

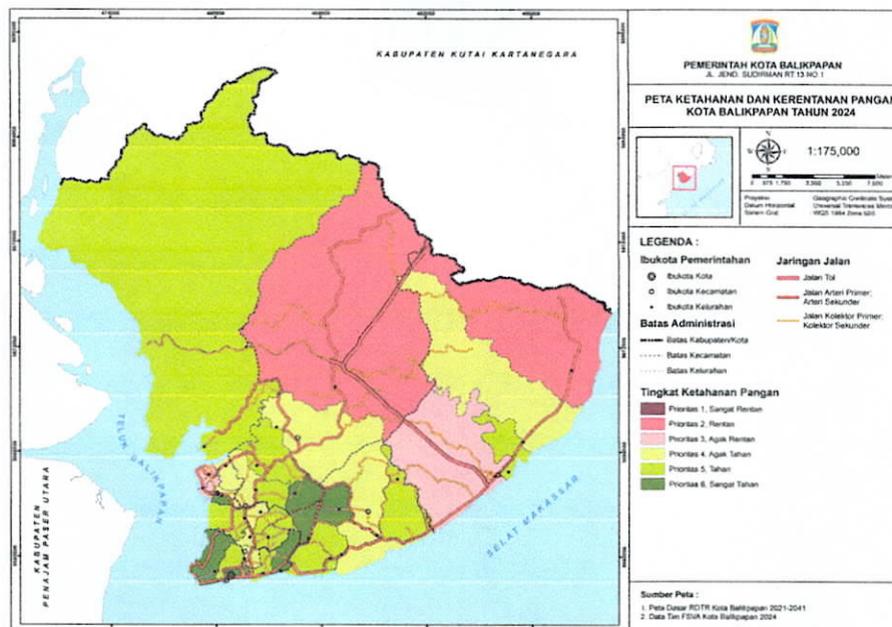
**Tabel 9. Sebaran Jumlah Kelurahan berdasarkan Prioritas**

<b>Prioritas</b>	<b>Jumlah Kelurahan</b>	<b>Persentase (%)</b>
1	0	0%
2	2	5,9%
3	3	8,8%
4	10	29,4%
5	12	35,3%
6	7	20,6%

Sumber: FSVA Kota Balikpapan 2024, Diolah.



Gambar 6. Prosentase Kelurahan berdasarkan Analisis Komposit (Gabungan Indikator)



Peta 6. Peta Komposit Ketahanan dan Kerentanan Pangan

Tidak terdapat kelurahan rentan pangan prioritas 1 di Kota Balikpapan pada tahun 2024. Kelurahan prioritas 2 berada di wilayah Kecamatan Balikpapan Timur (1 kelurahan), Kecamatan Balikpapan Utara (1 kelurahan), sebagaimana tertera pada tabel berikut:

**Tabel 10. Daftar Kelurahan Rentan Pangan Prioritas 2**

No	Kecamatan	Kelurahan	Indeks Komposit
1	Balikpapan Timur	Teritip	49,64
2	Balikpapan Utara	Karang Joang	48,33

Sumber: FSVA Kota Balikpapan 2024, Diolah.

Kelurahan prioritas 3 tersebar di wilayah Kecamatan Balikpapan Barat (2 kelurahan), Kecamatan Balikpapan Tengah (3 kelurahan), Kecamatan Utara (1 kelurahan), Kecamatan Balikpapan Timur (1 kelurahan), Kecamatan dan Kecamatan Balikpapan Selatan (1 Kelurahan) sebagaimana tertera pada tabel berikut:

**Tabel 11. Daftar Kelurahan Rentan Pangan Prioritas 3**

No	Kecamatan	Kelurahan	Indeks Komposit
1	Balikpapan Barat	Baru Tengah	57,45
		Baru Ulu	55,33
2	Balikpapan Timur	Manggar	58,10

Sumber: FSVA Kota Balikpapan 2024, Diolah.

## **FAKTOR PENYEBAB KERENTANAN PANGAN**

Berdasarkan dari analisis komposit 5 indikator, penyumbang terbesar kerawanan pangan terdapat pada rasio sarana dan prasarana penyedia pangan, rasio penduduk tidak sejahtera dan rasio tenaga kesehatan. Telah dilakukan pembentukan cut off baru pada indikator rasio sarana prasarana penyediaan pangan dikarenakan variasi data yang didapatkan cukup mengalami perubahan yang drastis yang bisa mempengaruhi indikator lainnya pada saat analisis kompositnya. Pada rasio penduduk tidak sejahtera tidak mengalami banyak penurunan khususnya kelurahan Karang Joang, Teritip, Baru ulu dan Baru tengah. Sedangkan jumlah tenaga kesehatan tidak banyak mengalami perubahan pada tahun 2023. Selain itu pula adanya kenaikan jumlah penduduk di Kelurahan Karang joang yang mencapai sekitar 2.042 orang membuat kelurahan Karang Joang indeks rasio kompositnya semakin rendah.

Pada kelurahan yang masuk agak rentan pangan (Prioritas 3) yaitu kelurahan Manggar dibandingkan tahun sebelumnya tidak adanya penambahan sarana penyediaan pangan dan rasio jumlah tenaga kesehata masih sangat minim menyebabkan kelurahan tersebut masih tetap berada di daerah agak rentan sedangkan 2 kelurahan di Kecamatan Balikpapan Barat yaitu Kelurahan Baru ulu dan Baru tengah dipengaruhi oleh minimnya sarana penyediaan

pangan dan masih tingginya jumlah penduduk tingkat kesejahteraan rendah membuat kedua wilayah tersebut masih berada di daerah agak rentan pangan meskipun jumlah tenaga kesehatan di wilayah tersebut sudah cukup proporsional atau berimbang.

.Kelurahan rentan terhadap kerawanan pangan Prioritas 3 secara umum disebabkan oleh: (1) tingginya rasio penduduk tidak sejahtera, (2) rasio penduduk pertenaga kesehatan dan (3) rendahnya rasio sarana prasarana penyedia pangan terhadap jumlah penduduk.

Strategi Peningkatan Ketahanan Pangan:

- a. Pemerintah Kota dapat memfokuskan kegiatan pembangunan di wilayah prioritas 2 dan 3 terutama pada sektor fasilitas sarana penyediaan pangan seperti pasar maupun supermarket.
- b. Pemberian insentif bagi pembangunan fasilitas kesehatan di wilayah rentan pangan Prioritas 2 dan 3.
- c. Melakukan evaluasi terhadap rencana aksi daerah pangan dan gizi serta dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD).
- d. Pembukaan peluang kerja bagi masyarakat terutama usia produktif di daerah rentan pangan.
- e. Memperkuat program jaring pengaman social untuk memastikan akses layanan dasar bagi masyarakat miskin

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN**

#### **6.1 KESIMPULAN**

Penyusunan dan analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kota Balikpapan tahun 2024 menggunakan data indikator tahun 2023. Setelah dilakukan analisis melalui lima indikator secara individu, maka dapat memperoleh hasil sebagai berikut:

- a. Indikator ketersediaan sarana penyedia pangan terdapat 6 kelurahan yang masuk prioritas 1 (sangat rentan) yaitu Kelurahan Manggar, Baru Ulu, Karang Joang, Graha Indah dan Karang Rejo dan Sepinggian Baru. Selain itu terdapat 6 kelurahan yang masuk prioritas 2 (Agak rentan) yaitu Kelurahan Baru Tengah, Batu Ampar, Muara Rapak, Sepinggian, Sepinggian Raya, Telaga Sari. Terdapat 8 kelurahan yang masuk prioritas 3 (rentan) yaitu Teritip, Manggar Baru, Baru Ilir, Margomulyo, Gunung Samarinda, Sumber Rejo, Sungai Nangka dan Damai Bahagia.
- b. Indikator penduduk tidak sejahtera (Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan) pada indikator ini 4 kelurahan masuk prioritas 1 yaitu Kelurahan Teritip, Baru Tengah, Baru Ulu, dan Mekar Sari. Pada Prioritas 2 terdapat 6 kelurahan yaitu Kelurahan Baru ilir, Margomulyo, Karang joang, Gunung Sari ilir, Karang Rejo dan Karang jati.
- c. Indikator Akses Jalan, semua kelurahan sudah masuk kategori 4 yaitu semua jalan sudah dapat dilalui sepanjang tahun.
- d. Pada Indikator akses air bersih terdapat seluruh kelurahan berada pada prioritas 4.
- e. Indikator tenaga kesehatan terdapat 4 kelurahan yang masuk prioritas 1 yaitu Kelurahan, Lamaru, Teritip, Kariangau dan Karang Joang. Selain itu terdapat 4 kelurahan yang masuk prioritas 2 yaitu Kelurahan Manggar, Batu ampar, Sepinggian dan Damai Bahagia. terdapat 9 kelurahan yang masuk prioritas 3 yaitu Kelurahan Manggar Baru, Margo Mulyo, Gunung Samarinda, Muara Rapak, Gunung Samarinda Baru, Karang Jati, Sumber rejo, Gunung Bahagia, dan Sepinggian raya.

Selanjutnya setelah dilakukan analisis komposit (gabungan indikator), maka memperoleh hasil kesimpulan berikut:

- a. Kelurahan dengan peringkat 1, 2 dan 3 teratas adalah Damai Baru, Gunung Samarinda Baru dan Margasari Ketiga kelurahan tersebut memiliki prioritas 6 (sangat tahan pangan) dari data table FSVA dapat menggambarkan sarana penyediaan pangan di wilayah tersebut cukup banyak sangat sesuai dengan jumlah penduduk dan luas wilayahnya, rasio tenaga kesehatan yang cukup mumpuni di wilayah tersebut terlihat banyaknya fasilitas kesehatan di wilayah tersebut, selain itu penduduk tidak sejahteranya relative kecil.
- b. Kelurahan dengan peringkat 32, 33 dan 34 terbawah adalah Baru Ulu, Teritip dan Karang Joang. Ketiga kelurahan tersebut terlihat kurangnya sarana penyediaan pangan, penduduk tidak sejahtera juga cukup tinggi selain itu tenaga kesehatan cukup minim di wilayah tersebut.

- c. Tidak terdapat kelurahan di Kota Balikpapan indikasi Prioritas 1 (Sangat rentan) namun Prioritas 2 (Agak rentan) terdapat 2 (Dua) kelurahan yaitu Kelurahan Teritip dan Karang Joang dan Prioritas 3 (rentan) terdapat 3 (tiga) kelurahan yaitu Kelurahan Manggar, Baru Tengah dan Baru Ulu.  
Hal ini menunjukkan kelurahan yang tidak mengalami perubahan indikasi rentan pangan adalah kelurahan Teritip dan meningkatnya kerentanan pangan pada kelurahan Karang Joang
- d. Prioritas 4 (Agak tahan pangan), terdapat 10 kelurahan yaitu Gunung Sari ilir, Sepinggian Baru, Margomulyo, Muara Rapak, Sepinggian Raya, Mekar Sari, Graha Indah, Baru ilir, Lamaru dan Karang Rejo.
- e. Prioritas 5 (Tahan pangan), terdapat 12 kelurahan yaitu Klandasan ilir, Karang JAti, Gunung Sari ulu, Kariangau, Gunung Samarinda, Sungai Nangka, Batu ampar, Telaga Sari Manggar Baru, Damai Bahagia, Sumber rejo dan Sepinggian.
- f. Prioritas 6 (Sangat tahan pangan), terdapat 7 Kelurahan yaitu Damai Baru, Gunung Samarinda Baru, Margasari, Klandasan Ulu, Damai, Prapatan dan Gunung Bahagia.

## 6.2 REKOMENDASI KEBIJAKAN

Program-program peningkatan ketahanan pangan dan penanganan kerentanan pangan di Kota Balikpapan diarahkan pada kegiatan:

- a. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Penyediaan Pangan melalui pemberian insentif serta kemudahan dalam izin berusaha maupun pembangunan pasar dan pertokoan;
- b. Melakukan Diversifikasi pangan dengan mendorong produksi pangan lokal di Kota Balikpapan serta memberikan akses kepada petani untuk teknologi modern ;
- c. Pemanfaatan lahan pekarangan sebagai sumber penyediaan pangan;
- d. Meningkatkan infrastruktur peenyimpanan pangan di Kota Balikpapan serta memanfaatkan peran BUMD bidang pangan;
- e. Pemberian bantuan pangan untuk masyarakat miskin serta memberikan peluang kerja untuk kepada masyarakat miskin terutama usia produktif;
- f. Meningkatkan kemampuan masyarakat untuk usaha-usaha produktif terkait pangan baik pelatihan bertani, berdagang serta peelatihan kerja lainnya yang mendukung sektor usaha di Kota Balikpapan;
- g. Memfasilitasi dan Mendorong tersalurnya Kredit usaha Mikro dari lembaga perbankan kepada masyarakat;
- h. Memperbanyak frekuensi pelaksanaan kegiatan-kegiatan Gerakan pangan murah maupun pasar murah di Kota Balikpapan.
- i. Membangun sarana prasarana kesehatan di daerah-daerah rentan pangan khususnya di wilayah Balikpapan Timur dan Balikpapan Utara;
- j. Pemberian insentif tambahan untuk tenaga kesehatan yang bekerja di daerah rentan pangan;
- k. Pemberian peluang pendidikan bagi putra-putri daerah melalui beasiswa tenaga kesehatan dengan peerjanjian dinas oleh Pemerintah daerah;

- l. Pembangunan infrastruktur dasar baik jalan, distribusi air bersih maupun pasar;
- m. Meningkatkan peran PKK (Program Kesejahteraan Keluarga) dalam pemberdayaan masyarakat setempat;
- n. Melanjutkan program bantuan jaminan BPJS kesehatan Kelas III penerima bantuan iuran non pekerja.
- o. Memperbanyak program program padat karya untuk wilayah Kota Balikpapan khusus daerah rentan pangan sebagai penyediaaan peluang kerja.
- p. Penambahan jumlah tenaga kesehatan Kota Balikpapan melalui peran BKPSDM Kota Balikpapan dan melalui jalur PWK (Pindah Wilayah Kerja) dari daerah lain

## DAFTAR PUSTAKA

BPS. (2023). *Balikpapan dalam angka 2024*. Balikpapan: Badan Pusat Statistik Kota Balikpapan.

BPS. (2023). *Profil Kemiskinan Kota Balikpapan Tahun 2023*. Balikpapan: Badan Pusat Statistik Kota Balikpapan.

# LAMPIRAN

# DOKUMENTASI

Senin, 2 April 2024



Senin, 8 Juli 2024



**Kamis, 6 September 2024**



Jum'at, 15 November 2024



**VALIDASI DATA INDIKATOR KETERSEDIAAN**

Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA-Kelurahan) 2024

Kota : Balikpapan

					Sumber	Podest 2021 diolah BKP	BPS	Data gabungan dari Dinas Perdagangan, DPMPTSP, DPOP	Validasi	KESEPAKATAN	
					Tahun	2021	2023	2023	2023		
No.	Nama Kecamatan	Kode Kec	Kode Kelurahan	Nama Kelurahan	2. Jumlah Sarana & Prasarana Penyedia Pangan	2. Data yang Dipakai di FSVA (Unit)	Keterangan Sarana & Prasarana				
	Balikpapan Timur	6471011	6471011001	Kelurahan Manggar				262		262	
	Balikpapan Timur	6471011	6471011002	Kelurahan Lamaru				178		178	
	Balikpapan Timur	6471011	6471011003	Kelurahan Teritip				161		161	
	Balikpapan Timur	6471011	6471011004	Kelurahan Manggar Baru				201		201	
	Balikpapan Barat	6471021	6471021001	Kelurahan Baru Ilir				193		193	
	Balikpapan Barat	6471021	6471021002	Kelurahan Baru Tengah				188		188	
	Balikpapan Barat	6471021	6471021003	Kelurahan Baru Ulu				168		168	
	Balikpapan Barat	6471021	6471021004	Kelurahan Kariangau				156		156	
	Balikpapan Barat	6471021	6471021005	Kelurahan Margo Mulyo				153		153	
	Balikpapan Barat	6471021	6471021006	Kelurahan Marga Sari				248		248	
	Balikpapan Utara	6471031	6471031001	Kelurahan Batu Ampar				310		310	
	Balikpapan Utara	6471031	6471031002	Kelurahan Gunungsamarinda				250		250	
	Balikpapan Utara	6471031	6471031003	Kelurahan Karang Joang				254		254	
	Balikpapan Utara	6471031	6471031004	Kelurahan Muararakap				249		249	
	Balikpapan Utara	6471031	6471031005	Kelurahan Gunungsamarinda Baru				212		212	
	Balikpapan Utara	6471031	6471031006	Kelurahan Graha Indah				240		240	
	Balikpapan Tengah	6471041	6471041001	Kelurahan Gunungsari Ulu				195		195	
	Balikpapan Tengah	6471041	6471041002	Kelurahan Gunungsari Ilir				243		243	
	Balikpapan Tengah	6471041	6471041003	Kelurahan Karang Rejo				184		184	
	Balikpapan Tengah	6471041	6471041004	Kelurahan Karang Jati				167		167	
	Balikpapan Tengah	6471041	6471041005	Kelurahan Mekar Sari				162		162	
	Balikpapan Tengah	6471041	6471041006	Kelurahan Sumber Rejo				196		196	
	Balikpapan Selatan	6471051	6471051002	Kelurahan Sepinggian				326		326	
	Balikpapan Selatan	6471051	6471051006	Kelurahan Gunungbahagia				242		242	
	Balikpapan Selatan	6471051	6471051008	Kelurahan Sepinggian Baru				225		225	
	Balikpapan Selatan	6471051	6471051009	Kelurahan Sepinggian Raya				145		145	
	Balikpapan Selatan	6471051	6471051010	Kelurahan Sungainangka				176		176	
	Balikpapan Selatan	6471051	6471051011	Kelurahan Damai Baru				204		204	
	Balikpapan Selatan	6471051	6471051012	Kelurahan Damai Bahagia				175		175	
	Balikpapan Kota	6471061	6471061001	Kelurahan Prapatan				167		167	
	Balikpapan Kota	6471061	6471061002	Kelurahan Telaga Sari				162		162	
	Balikpapan Kota	6471061	6471061003	Kelurahan Klandasan Ulu				242		242	
	Balikpapan Kota	6471061	6471061004	Kelurahan Klandasan Ilir				284		284	
	Balikpapan Kota	6471061	6471061005	Kelurahan Damai				271		271	

					Sumber	P3KE Desil 1	BPS	Dinas Sosial	Validasi	KESEPAKATAN							
					Tahun	2023	2023	2023	2023		Podes 2021 diolah BKP	BPS	Dinas	Validasi	KESEPAKATAN		
No.	Nama Kecamatan	Kode Kec	Kode Kelurahan	Nama Kelurahan	3. Jumlah Pddk Tingkat Kesejahteraan Terendah	3. Data yang dipakai di FSVA (Jiwa)	Keterangan Pddk Kesejahteraan Terendah	4. Desa Tanpa Akses Penghubung Memadai	4. Data yang dipakai di FSVA	Keterangan Desa Tanpa Akses Penghubung							
	Balikipapan Timur	6471011	6471011001	Kelurahan Manggar	1.434		314		314					1		1	
	Balikipapan Timur	6471011	6471011002	Kelurahan Lamaru	420		111		111					1		1	
	Balikipapan Timur	6471011	6471011003	Kelurahan Teritip	1.287		291		291					1		1	
	Balikipapan Timur	6471011	6471011004	Kelurahan Manggar Baru	642		157		157					1		1	
	Balikipapan Barat	6471021	6471021001	Kelurahan Baru Ilir	871		239		239					1		1	
	Balikipapan Barat	6471021	6471021002	Kelurahan Baru Tengah	1.715		331		331					1		1	
	Balikipapan Barat	6471021	6471021003	Kelurahan Baru Ulu	2.369		352		352					1		1	
	Balikipapan Barat	6471021	6471021004	Kelurahan Kariangau	133		34		34					1		1	
	Balikipapan Barat	6471021	6471021005	Kelurahan Margo Mulyo	526		151		151					1		1	
	Balikipapan Barat	6471021	6471021006	Kelurahan Marga Sari	412		111		111					1		1	
	Balikipapan Utara	6471031	6471031001	Kelurahan Batu Ampar	712		62		62					1		1	
	Balikipapan Utara	6471031	6471031002	Kelurahan Gunungsamarinda	460		111		111					1		1	
	Balikipapan Utara	6471031	6471031003	Kelurahan Karang Joang	1.553		446		446					1		1	
	Balikipapan Utara	6471031	6471031004	Kelurahan Muararapak	1.297		195		195					1		1	
	Balikipapan Utara	6471031	6471031005	Kelurahan Gunungsamarinda Baru	108		42		42					1		1	
	Balikipapan Utara	6471031	6471031006	Kelurahan Graha Indah	1.497		256		256					1		1	
	Balikipapan Tengah	6471041	6471041001	Kelurahan Gunung Sari Ulu	398		111		111					1		1	
	Balikipapan Tengah	6471041	6471041002	Kelurahan Gunung Sari Ilir	258		218		218					1		1	
	Balikipapan Tengah	6471041	6471041003	Kelurahan Karang Rejo	923		263		263					1		1	
	Balikipapan Tengah	6471041	6471041004	Kelurahan Karang Jati	413		116		116					1		1	
	Balikipapan Tengah	6471041	6471041005	Kelurahan Mekar Sari	344		195		195					1		1	
	Balikipapan Tengah	6471041	6471041006	Kelurahan Sumber Rejo	436		137		137					1		1	
	Balikipapan Selatan	6471051	6471051002	Kelurahan Sepinggan	1.031		203		203					1		1	
	Balikipapan Selatan	6471051	6471051006	Kelurahan Gunungbahagia	254		53		53					1		1	
	Balikipapan Selatan	6471051	6471051008	Kelurahan Sepinggan Baru	310		118		118					1		1	
	Balikipapan Selatan	6471051	6471051009	Kelurahan Sepinggan Raya	711		141		141					1		1	
	Balikipapan Selatan	6471051	6471051010	Kelurahan Sungaiangka	439		72		72					1		1	
	Balikipapan Selatan	6471051	6471051011	Kelurahan Damai Baru	129		4		4					1		1	
	Balikipapan Selatan	6471051	6471051012	Kelurahan Damai Bahagia	533		100		100					1		1	
	Balikipapan Kota	6471061	6471061001	Kelurahan Prapatan	135		63		63					1		1	
	Balikipapan Kota	6471061	6471061002	Kelurahan Telaga Sari	321		86		86					1		1	
	Balikipapan Kota	6471061	6471061003	Kelurahan Klandasan Ulu	590		98		98					1		1	
	Balikipapan Kota	6471061	6471061004	Kelurahan Klandasan Ilir	672		119		119					1		1	
	Balikipapan Kota	6471061	6471061005	Kelurahan Damai	239		63		63					1		1	

		Sumber Data Dasar				KESEPAKATAN				KESEPAKATAN						
		Dinas Kesehatan	Bappeda	Dinas PU	Validasi			Dinas Kesehatan	BPS	Dinas PMTPSP	Validasi					
		Tahun	2023	2023	2023	2023			2023	2023	2023	2023				
No.	Nama Kecamatan	Kode Kec	Kode Kelurahan	Nama Kelurahan	5. Jumlah RT Tanpa Akses Air Bersih	5. Data yang dipakai di FSVA (RT)	Keterangan NoWater	6. Jumlah Tenaga Kesehatan	6. Data yang dipakai di FSVA (Orang)	Keterangan Jumlah Tenaga Kesehatan						
	Balikpapan Timur	6471011	6471011001	Kelurahan Manggar		29.363	46		46		42		34		42	
	Balikpapan Timur	6471011	6471011002	Kelurahan Lamaru		2.910	14		14		18		3		18	
	Balikpapan Timur	6471011	6471011003	Kelurahan Teritip		4.611	17		17		24		5		24	
	Balikpapan Timur	6471011	6471011004	Kelurahan Manggar Baru		6.115	19		19		113		45		113	
	Balikpapan Barat	6471021	6471021001	Kelurahan Baru Ilir		4.920	19		19		122		34		122	
	Balikpapan Barat	6471021	6471021002	Kelurahan Baru Tengah		13.135	22		22		25		10		25	
	Balikpapan Barat	6471021	6471021003	Kelurahan Baru Ulu		10.855	21		21		41		9		41	
	Balikpapan Barat	6471021	6471021004	Kelurahan Kariangau		5.470	7		7		35		18		35	
	Balikpapan Barat	6471021	6471021005	Kelurahan Margo Mulyo		5.884	14		14		18		5		18	
	Balikpapan Barat	6471021	6471021006	Kelurahan Marga Sari		3.147	12		12		20		17		20	
	Balikpapan Utara	6471031	6471031001	Kelurahan Batu Ampar		1.706	37		37		50		284		50	
	Balikpapan Utara	6471031	6471031002	Kelurahan Gunungsamarinda		4.894	24		24		53		32		53	
	Balikpapan Utara	6471031	6471031003	Kelurahan Karang Joang		5.806	33		33		47		14		47	
	Balikpapan Utara	6471031	6471031004	Kelurahan Muararapak		7.263	30		30		30		25		30	
	Balikpapan Utara	6471031	6471031005	Kelurahan Gunungsamarinda Baru		-4.507	10		10		25		13		25	
	Balikpapan Utara	6471031	6471031006	Kelurahan Graha Indah		728	42		42		1.048		44		1.048	
	Balikpapan Tengah	6471041	6471041001	Kelurahan Gunungsari Ulu		5.888	15		15		342		41		342	
	Balikpapan Tengah	6471041	6471041002	Kelurahan Gunungsari Ilir		4.243	22		22		325		52		325	
	Balikpapan Tengah	6471041	6471041003	Kelurahan Karang Rejo		3.498	24		24		32		13		32	
	Balikpapan Tengah	6471041	6471041004	Kelurahan Karang Jati		3.863	11		11		76		9		76	
	Balikpapan Tengah	6471041	6471041005	Kelurahan Mekar Sari		1.915	13		13		36		16		36	
	Balikpapan Tengah	6471041	6471041006	Kelurahan Sumber Rejo		5.272	21		21		40		20		40	
	Balikpapan Selatan	6471051	6471051002	Kelurahan Sepinggang		24.538	35		35		35		92		35	
	Balikpapan Selatan	6471051	6471051006	Kelurahan Gunungbahagia		-152	20		20		68		66		68	
	Balikpapan Selatan	6471051	6471051008	Kelurahan Sepinggang Baru		15.393	32		32		310		93		310	
	Balikpapan Selatan	6471051	6471051009	Kelurahan Sepinggang Raya		7.493	16		16		83		20		83	
	Balikpapan Selatan	6471051	6471051010	Kelurahan Sungainangka		1.171	19		19		302		66		302	
	Balikpapan Selatan	6471051	6471051011	Kelurahan Damai Baru		89	8		8		73		99		73	
	Balikpapan Selatan	6471051	6471051012	Kelurahan Damai Bahagia		-372	18		18		27		44		27	
	Balikpapan Kota	6471061	6471061001	Kelurahan Prapatan		2.732	11		11		783		163		783	
	Balikpapan Kota	6471061	6471061002	Kelurahan Telaga Sari		1.559	18		18		57		25		57	
	Balikpapan Kota	6471061	6471061003	Kelurahan Klandasan Ulu		133	14		14		332		130		332	
	Balikpapan Kota	6471061	6471061004	Kelurahan Klandasan Ilir		7.762	23		23		246		85		246	
	Balikpapan Kota	6471061	6471061005	Kelurahan Damai		2.497	20		20		242		83		242	

No.	Nama Kecamatan	Kode Kec	Kode Kelurahan	Nama Kelurahan	Sumber Data Dasar					Proyeksi 2019					Proyeksi 2019							
					2019 diolah BPS					diolah BPS					diolah BPS							
					BPS	Dinas	Validasi	KESIMPULAN	BPS	Dinas	Validasi	KESIMPULAN	BPS	Dinas	Validasi	KESIMPULAN	BPS	Dinas	Validasi	KESIMPULAN		
Tahun	2020	2023	2023	2023	2022	2023	2023	2023	2022	2023	2023	2023	2022	2023	2023	2023	2023					
		a. Luas Wilayah Kelurahan (Ha)	a. Data yang dipikisi di FSVA (Ha)	Keterangan Luas Wilayah	b. Jumlah Penduduk Kelurahan	b. Data yang dipikisi di FSVA (Jawa)	Keterangan Jumlah Penduduk	c. Jumlah Rumah Tangga	c. Data yang dipikisi di FSVA (RT)	Keterangan Jumlah Rumah Tangga	d. Tingkat Kepapatan Penduduk	d. Data yang dipikisi di FSVA (Jawa/Km2)	Keterangan Tingkat Kepapatan									
Balikpapan Timur	647011	647011001	Kelurahan Manggar			3.304		49.508								16.417	16.417		1.498,49	1.498,49		
Balikpapan Timur	647011	647011002	Kelurahan Lamrau			3.607		15.075								4.988	4.988		417,94	417,94		
Balikpapan Timur	647011	647011003	Kelurahan Teritip			4.484		18.396								6.098	6.098		410,29	410,29		
Balikpapan Timur	647011	647011004	Kelurahan Manggar Baru			522		19.980								6.735	6.735		3.830,82	3.830,82		
Balikpapan Barat	647021	647021001	Kelurahan Baru Iir			71		18.510								6.675	6.675		25.957,09	25.957,09		
Balikpapan Barat	647021	647021002	Kelurahan Baru Tengah			91		22.590								7.761	7.761		24.756,16	24.756,16		
Balikpapan Barat	647021	647021003	Kelurahan Baru Ulu			121		22.420								7.678	7.678		18.498,35	18.498,35		
Balikpapan Barat	647021	647021004	Kelurahan Karangau			18.752		7.355								2.573	2.573		38,22	38,22		
Balikpapan Barat	647021	647021005	Kelurahan Marga Mulyo			197		14.629								5.052	5.052		7.423,25	7.423,25		
Balikpapan Barat	647021	647021006	Kelurahan Marga Sari			57		12.317								4.282	4.282		21.631,54	21.631,54		
Balikpapan Utara	647031	647031001	Kelurahan Batu Ampar			780		39.036								13.328	13.328		5.004,36	5.004,36		
Balikpapan Utara	647031	647031002	Kelurahan Gunungmarinda			266		25.794								8.724	8.724		5.677,95	5.677,95		
Balikpapan Utara	647031	647031003	Kelurahan Karang Karang			10.233		36.171								11.914	11.914		353,49	353,49		
Balikpapan Utara	647031	647031004	Kelurahan Muararak			317		30.143								10.636	10.636		9.517,54	9.517,54		
Balikpapan Utara	647031	647031005	Kelurahan Gunungmarinda Baru			304		11.373								3.709	3.709		3.738,66	3.738,66		
Balikpapan Utara	647031	647031006	Kelurahan Graha Indah			1.925		46.098								15.026	15.026		2.395,21	2.395,21		
Balikpapan Tengah	647041	647041001	Kelurahan Gunung Sari Ulu			206		15.288								5.446	5.446		7.435,44	7.435,44		
Balikpapan Tengah	647041	647041002	Kelurahan Gunung Sari Iir			109		21.198								7.827	7.827		19.535,53	19.535,53		
Balikpapan Tengah	647041	647041003	Kelurahan Karang Rejo			122		23.818								8.523	8.523		19.538,97	19.538,97		
Balikpapan Tengah	647041	647041004	Kelurahan Karang Jati			358		11.523								4.117	4.117		3.217,82	3.217,82		
Balikpapan Tengah	647041	647041005	Kelurahan Mekar Sari			72		12.885								4.724	4.724		17.804,34	17.804,34		
Balikpapan Tengah	647041	647041006	Kelurahan Sumber Rejo			216		21.037								7.357	7.357		9.734,84	9.734,84		
Balikpapan Selatan	647051	647051001	Kelurahan Sepinggan			870		38.573								12.735	12.735		4.435,11	4.435,11		
Balikpapan Selatan	647051	647051002	Kelurahan Gunung Bahagia			374		21.828								7.491	7.491		5.838,55	5.838,55		
Balikpapan Selatan	647051	647051003	Kelurahan Sepinggan Baru			1.064		35.523								11.478	11.478		3.339,57	3.339,57		
Balikpapan Selatan	647051	647051004	Kelurahan Sepinggan Raya			663		16.938								5.791	5.791		2.556,48	2.556,48		
Balikpapan Selatan	647051	647051005	Kelurahan Sungaiwangta			320		19.551								6.794	6.794		6.110,07	6.110,07		
Balikpapan Selatan	647051	647051006	Kelurahan Dama Baru			216		7.744								2.699	2.699		3.593,00	3.593,00		
Balikpapan Selatan	647051	647051007	Kelurahan Dama Bahagia			528		18.163								6.417	6.417		3.443,09	3.443,09		
Balikpapan Kota	647061	647061001	Kelurahan Prapatan			503		11.627								4.123	4.123		2.313,00	2.313,00		
Balikpapan Kota	647061	647061002	Kelurahan Telaga Sari			176		17.974								6.302	6.302		10.189,92	10.189,92		
Balikpapan Kota	647061	647061003	Kelurahan Klandasan Ulu			160		13.388								4.886	4.886		8.377,45	8.377,45		
Balikpapan Kota	647061	647061004	Kelurahan Klandasan Iir			197		22.372								8.255	8.255		11.350,01	11.350,01		
Balikpapan Kota	647061	647061005	Kelurahan Dama			269		19.717								7.100	7.100		7.326,47	7.326,47		



WALI KOTA BALIKPAPAN  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN WALI KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 188.45-401/2024

TENTANG

TIM PENYUSUN PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN  
KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2024

WALI KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyediakan informasi mengenai situasi ketahanan dan kerentanan pangan sebagai dasar rekomendasi kebijakan di bidang pangan, termasuk pengendalian kerawanan pangan, perlu disusun peta ketahanan dan kerentanan pangan (*food security and vulnerability atlas*);
- b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk tim penyusun peta ketahanan dan kerentanan pangan Kota Balikpapan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Penyusun Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kota Balikpapan Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1301);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :  
KESATU : Tim Penyusun Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kota Balikpapan Tahun 2024 dengan susunan personel sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim penyusun sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu melaksanakan tugas:
- a. Pengarah:  
memberikan arahan, saran dan pertimbangan kepada tim penyusun dalam pelaksanaan penyusunan peta ketahanan dan kerentanan pangan.
- b. Pelaksana:
1. Ketua:  
a) bertanggung jawab atas pelaksanaan penyusunan peta ketahanan dan kerentanan pangan; dan  
b) berkoordinasi dengan instansi terkait untuk penyusunan peta ketahanan dan kerentanan pangan.
2. Sekretaris:  
membantu Ketua dalam pelaksanaan penyusunan peta ketahanan dan kerentanan pangan.
3. Anggota:  
a) melakukan koordinasi, konsolidasi, kompilasi, validasi dan verifikasi data indikator peta ketahanan dan kerentanan pangan;  
b) menyepakati data yang digunakan untuk analisis;  
c) mengolah dan menganalisis data indikator ketahanan dan kerentanan pangan;  
d) menyusun hasil analisis dan rekomendasi kebijakan pengentasan daerah rentan rawan pangan;  
e) memproses penetapan hasil penyusunan peta ketahanan dan kerentanan pangan;  
f) melakukan publikasi dan penyebarluasan hasil peta ketahanan dan kerentanan pangan melalui media elektronik dan non elektronik;  
g) melakukan bimbingan teknis dan supervisi serta pendampingan penyusunan peta ketahanan dan kerentanan pangan; dan  
h) meningkatkan sinergi program dan/atau kegiatan untuk penanganan daerah rentan rawan pangan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, Ketua Tim Penyusun sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu menyampaikan laporan dan bertanggung jawab kepada Wali Kota Balikpapan melalui Kepala Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Salinan Keputusan ini di sampaikan kepada Yth:

1. Kepala DP3 Kota Balikpapan;
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA BALIKPAPAN  
NOMOR 188.45-401/2024  
TENTANG  
TIM PENYUSUN PETA KETAHANAN DAN  
KERENTANAN PANGAN KOTA BALIKPAPAN  
TAHUN 2024

SUSUNAN PERSONEL TIM PENYUSUN PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN  
PANGAN KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2024

a. Tim Pengarah

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	Kepala DP3 Kota Balikpapan	Pengarah
2.	Sekretaris DP3 Kota Balikpapan	Pengarah

b. Tim Pelaksana

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1.	Wahidin Alaudin	DP3 Kota Balikpapan	Ketua
2.	Dicky Hariyono	DP3 Kota Balikpapan	Sekretaris
3.	Jumariyani	DP3 Kota Balikpapan	Anggota
4.	Joko Mujiono	Dinsos Kota Balikpapan	Anggota
5.	Emmanuel Azhar	Bappeda Litbang Kota Balikpapan	Anggota
6.	Devi Permanasari	Disdag Kota Balikpapan	Anggota
7.	Alfiyah R. T.	DPU Kota Balikpapan	Anggota
8.	Theodorus Dayutama	DPOP Kota Balikpapan	Anggota
9.	Natalia Sarah Pahlevie	DPMPSTP Kota Balikpapan	Anggota
10.	Ari Priswanto	Dinkes Kota Balikpapan	Anggota
11.	Nurlaila	DP3 Kota Balikpapan	Anggota
12.	Pristianti N.A.	DP3 Kota Balikpapan	Anggota
13.	Yuliana	DP3 Kota Balikpapan	Anggota
14.	Ema Diantary	DP3 Kota Balikpapan	Anggota
15.	Diah Ernawati, SP	DP3 Kota Balikpapan	Anggota

